



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



<https://bappeda.kukarkab.go.id>



BAPPEDA KUTAI KARTANEGARA



bappeda.kutaikartanegara



Bappeda Kutai Kartanegara

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2021**



**2022**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjiP Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2021 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat secara keseluruhan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Tenggarong, 22 Februari 2022  
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara  
Plt.Kepala



**Sy. Vanesa Vilna SIS, SE., MM**  
NIP. 19740217 199703 2 004

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA tercapai 100% dengan realisasi capaian pada tahun 2021 mendapat predikat A (85,21).
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi tercapai 100% dengan realisasi capaian pada tahun 2021 kembali mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk Kategori Pemerintah Kabupaten dalam ajang Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian peringkat pertama tingkat provinsi Kalimantan Timur.
3. Sasaran Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah dengan capaian 87,20% atau terealisasi sebesar 96,89%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, terutama di masa pandemi covid-19 dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi.
3. Peningkatan Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang terintegrasi sehingga memudahkan dalam proses perencanaan sampai evaluasi dengan memperoleh prinsip efektif dan efisien.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Tenggarong, 22 Februari 2022  
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara  
Plt.Kepala



**Sy. Vanesa Vilna SIS, SE., MM**  
NIP. 19740217 199703 2 004

## DAFTAR ISI

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                       | i   |
| IKHTISAR EKSEKUTIF.....                                                   | ii  |
| DAFTAR ISI.....                                                           | iv  |
| DAFTAR TABEL.....                                                         | vi  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                        | vii |
| BAB I.....                                                                | 1   |
| PENDAHULUAN.....                                                          | 1   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                  | 1   |
| 1.2. Tugas dan Fungsi.....                                                | 1   |
| 1.2.1. Tugas.....                                                         | 1   |
| 1.2.2. Fungsi.....                                                        | 2   |
| 1.3. Sumber Daya Manusia.....                                             | 5   |
| 1.4. Sarana Dan Prasarana.....                                            | 6   |
| 1.5. Aspek Strategis Organisasi.....                                      | 9   |
| 1.6. Isu Strategis.....                                                   | 10  |
| 1.7. Sistematika Laporan.....                                             | 11  |
| BAB II.....                                                               | 12  |
| PERENCANAAN KINERJA.....                                                  | 12  |
| 2.1. Perencanaan Strategis.....                                           | 12  |
| 2.2. Tujuan Dan Sasaran.....                                              | 12  |
| 2.2.1. Tujuan.....                                                        | 12  |
| 2.3. Indikator Kinerja Utama.....                                         | 38  |
| 2.4. Rencana Kinerja Tahunan.....                                         | 39  |
| 2.5. Perjanjian Kinerja.....                                              | 45  |
| 2.5.1. Rencana Anggaran Tahun 2021.....                                   | 46  |
| 2.5.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....                        | 54  |
| BAB III.....                                                              | 55  |
| AKUNTABILITAS KINERJA.....                                                | 55  |
| 3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun sebelumnya..... | 55  |
| 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....                           | 56  |
| 3.3. Analisis Capaian Kinerja Organisasi per sasaran.....                 | 57  |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA .....              | 57 |
| 3.3.2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah .....    | 63 |
| 3.3.3. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran OPD..... | 69 |
| 3.4. Analisis Capaian Perjanjian Kinerja Tambahan .....              | 77 |
| 3.5. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya .....            | 81 |
| 3.6. Realisasi Program, Kegiatan & Anggaran .....                    | 83 |
| BAB IV .....                                                         | 99 |
| PENUTUP .....                                                        | 99 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Daftar Barang BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara .....                     | 6  |
| Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Tahun 2016-2021 .....            | 14 |
| Tabel 3. Cascading Visi-Misi Kabupaten dengan Perencanaan Strategis Bappeda .....    | 15 |
| Tabel 4. Mapping Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Nomenklatur Baru) .....          | 17 |
| Tabel 5. IKU Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....                | 38 |
| Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2021 .....                                            | 39 |
| Tabel 7. PK & Target Sasaran Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021....      | 45 |
| Tabel 8. Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2021 .....                                | 45 |
| Tabel 9. Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran (APBD) Tahun 2021..      | 47 |
| Tabel 10. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan 2020 .....       | 55 |
| Tabel 11. Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara .....       | 55 |
| Tabel 12. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 .....                                | 56 |
| Tabel 13. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Ke-2.....                           | 69 |
| Tabel 14. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Ke-3.....                           | 75 |
| Tabel 15. Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja .....               | 82 |
| Tabel 16. Realisasi Kinerja Anggaran per Sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja .. | 83 |
| Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Keuangan serta Efisiensi .....          | 85 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara .....          | 4  |
| Gambar 2. Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin .....                          | 5  |
| Gambar 3. Logical Framework Aspek Strategis Bappeda Kab. Kutai Kartanegara.....  | 10 |
| Gambar 4. Tujuan Dan Sasaran Misi Ke-1 Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.   | 13 |
| Gambar 5. Cascading Dan Aligment Renstra Bappeda Terhadap RPJMD .....            | 14 |
| Gambar 6. Cascading Program berdasarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah .... | 16 |
| Gambar 7. Perbandingan Capaian Akuntabilitas Kinerja Bappeda tahun 2018-2021.... | 58 |
| Gambar 8. Faktor Pendukung Capaian IKU 1.....                                    | 59 |
| Gambar 9. Faktor Penghambat Capaian IKU 1 .....                                  | 60 |
| Gambar 10. Headline Kutai Kartanegara Raih Penghargaan PPD .....                 | 64 |
| Gambar 11. Perbandingan Capaian Kinerja IKU-2.....                               | 65 |
| Gambar 12. Perbandingan Capaian IKU 3 Periode 2017-2021 .....                    | 71 |
| Gambar 13. Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2020 & 2021 .....                | 95 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Mendorong Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.2. Tugas dan Fungsi**

#### **1.2.1. Tugas**

Sesuai Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah, dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **1.1.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi:

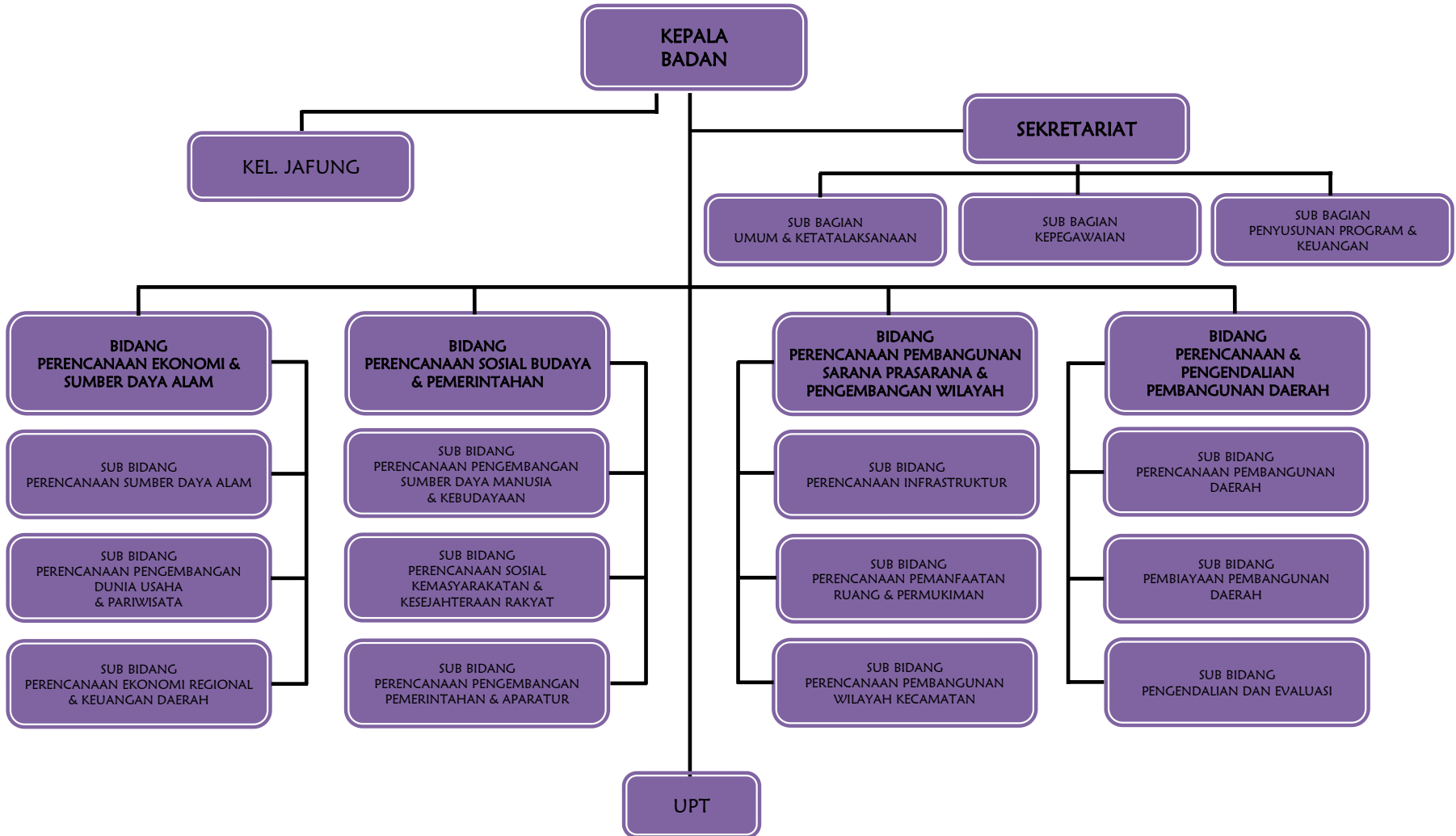
- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
  2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
  3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah.
4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kebudayaan;

2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah, membawahkan;
  1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah;
  2. Sub Bidang Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;
  3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan.
6. Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah, membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
  3. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara



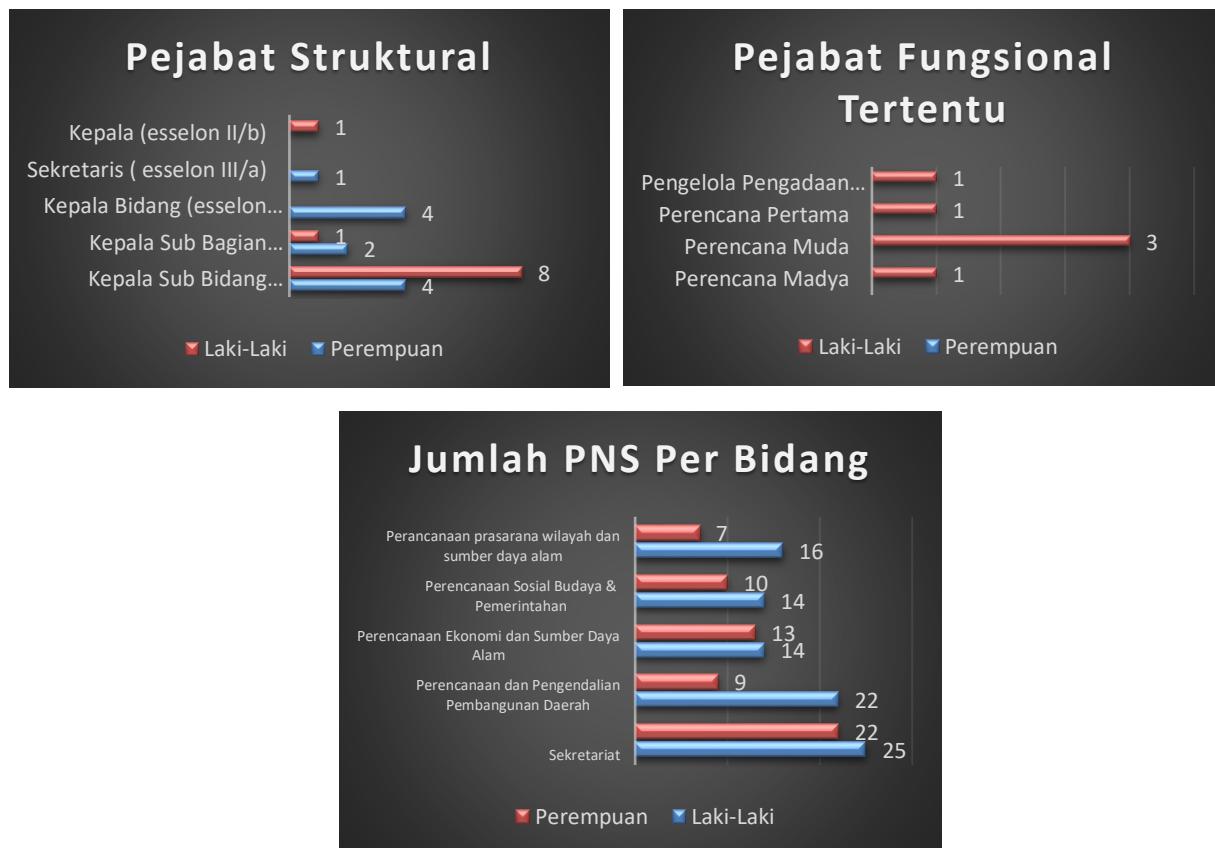
Sumber: Struktur Organisasi BAPPEDA Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016

### 1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di BAPPEDA. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebanyak 134 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 16 Orang berstatus Tenaga Harian Lepas. Adapun komposisi mengenai Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah BAPPEDA disajikan pada gambar-gambar berikut ini.

Gambar 2. Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Bagian Kepegawaian BAPPEDA, 2022

#### 1.4. Sarana Dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Barang BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

| No          | Nama Barang                                | Jumlah |
|-------------|--------------------------------------------|--------|
| <b>A</b>    | <b>PERALATAN DAN MESIN</b>                 |        |
| 1.3.2.1     | <b>ALAT BESAR</b>                          |        |
| 1.3.2.1.3   | <b>ALAT BANTU</b>                          |        |
| 1.3.2.1.3.2 | FEEDER                                     |        |
|             | Elevator /Lift                             | 2      |
| <b>B</b>    | <b>ALAT ANGKUTAN</b>                       |        |
| 1.3.2.2.1   | <b>ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR</b>        |        |
| 1.3.2.2.1.1 | <b>KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN</b> |        |
|             | Station Wagon                              | 6      |
| 1.3.2.2.1.3 | <b>KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG</b>  |        |
|             | Pick Up                                    | 3      |
| 1.3.2.2.1.4 | <b>KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA</b>       |        |
|             | Sepeda Motor/Scooter                       | 40     |
| <b>C</b>    | <b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>          |        |
| 1.3.2.3.3   | <b>ALAT UKUR</b>                           |        |
| 1.3.2.3.3.1 | <b>ALAT UKUR UNIVERSAL</b>                 |        |
|             | Global Positioning System                  | 3      |
| 1.3.2.3.3.7 | <b>UNIVERSAL TESTER</b>                    |        |
|             | Scanner (Universal Tester)                 | 2      |
| <b>D</b>    | <b>ALAT PENYIMPAN</b>                      |        |
|             | Lemari Penyimpan                           | 1      |
| <b>E</b>    | <b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>        |        |
| 1.3.2.5.1   | <b>ALAT KANTOR</b>                         |        |
| 1.3.2.5.1.2 | <b>MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH</b>           |        |
|             | Mesin Penghitung Uang                      | 2      |
| 1.3.2.5.1.3 | <b>ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)</b>      |        |
|             | Mesin Fotocopy Folio                       | 1      |
| 1.3.2.5.1.4 | <b>ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>  |        |
|             | Lemari Besi/Metal                          | 53     |
|             | Lemari Kayu                                | 92     |
|             | Rak Besi                                   | 55     |
|             | Filing Cabinet Besi                        | 20     |
|             | Brandkas                                   | 11     |
|             | Peti Uang/Cash Box/Coin Box                | 8      |
|             | Lemari Kaca                                | 1      |

| No          | Nama Barang                                         | Jumlah |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1.3.2.5.1.5 | <b>ALAT KANTOR LAINNYA</b>                          |        |
|             | CCTV - Camera Control Television System             | 1      |
|             | Papan Visual/Papan Nama                             | 1      |
|             | White Board                                         | 8      |
|             | Alat Penghancur Kertas                              | 16     |
|             | Mesin Absensi                                       | 4      |
|             | Alat Pengaman / Sinyal                              | 20     |
|             | Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)                 | 2      |
|             | Papan Nama Instansi                                 | 2      |
|             | Papan Tulis                                         | 2      |
| <b>F</b>    | 1.3.2.5.2 <b>ALAT RUMAH TANGGA</b>                  |        |
|             | 1.3.2.5.2.1 <b>MEUBELAIR</b>                        |        |
|             | Meja Kerja Kayu                                     | 1      |
|             | Kursi Besi/Metal                                    | 3      |
|             | Kursi Kayu                                          | 55     |
|             | Meja Rapat                                          | 39     |
|             | Meja Resepsionis                                    | 3      |
|             | Meja Komputer                                       | 13     |
|             | Partisi                                             | 2      |
|             | 1.3.2.5.2.2 <b>ALAT PENGUKUR WAKTU</b>              |        |
|             | Jam Elektronik                                      | 30     |
|             | 1.3.2.5.2.3 <b>ALAT PEMBERSIH</b>                   |        |
|             | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner                 | 1      |
|             | Alat Pembersih lainnya                              | 35     |
|             | 1.3.2.5.2.4 <b>ALAT PENDINGIN</b>                   |        |
|             | Lemari Es                                           | 7      |
|             | A.C. Window                                         | 29     |
|             | A.C. Split                                          | 23     |
|             | Kipas Angin                                         | 6      |
|             | 1.3.2.5.2.7 <b>ALAT PEMADAM KEBAKARAN</b>           |        |
|             | Alat Pemadam Kebakaran lainnya                      | 16     |
| <b>G</b>    | 1.3.2.5.3 <b>MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT</b> |        |
|             | 1.3.2.5.3.1 <b>MEJA KERJA PEJABAT</b>               |        |
|             | Meja Kerja Pejabat Eselon III                       | 1      |
|             | Meja Kerja Pejabat Eselon IV                        | 18     |
|             | Meja Kerja Pegawai Non Struktural                   | 292    |
|             | Meja Kerja Pejabat lain-lain                        | 10     |
|             | 1.3.2.5.3.2 <b>MEJA RAPAT PEJABAT</b>               |        |
|             | Meja Rapat Pejabat Eselon III                       | 2      |
|             | Meja Tamu Biasa                                     | 1      |
|             | Meja Maket/Peta                                     | 1      |
|             | Meja Operator                                       | 1      |
|             | 1.3.2.5.3.3 <b>KURSI KERJA PEJABAT</b>              |        |
|             | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                       | 1      |
|             | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                      | 1      |

| No          | Nama Barang                                           | Jumlah                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|             | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                         | 17                                          |
|             | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural                    | 532                                         |
|             | Kursi Kerja Pejabat lainnya                           | 9                                           |
| 1.3.2.5.3.5 | <b>KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT</b>           |                                             |
|             | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II        | 94                                          |
|             | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III       | 96                                          |
| 1.3.2.5.3.7 | <b>LEMARI DAN ARSIP PEJABAT</b>                       |                                             |
|             | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis                 | 20                                          |
|             | Buffet Kaca                                           | 1                                           |
| H           | 1.3.2.6                                               | <b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b> |
|             | 1.3.2.6.1                                             | <b>ALAT STUDIO</b>                          |
|             | 1.3.2.6.1.2                                           | <b>PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM</b>      |
|             | Camera Electronic                                     | 32                                          |
|             | Video Monitor                                         | 3                                           |
|             | Video Processor                                       | 1                                           |
|             | Camera Film                                           | 3                                           |
|             | Lensa Kamera                                          | 2                                           |
|             | Layar Film/Projector                                  | 50                                          |
|             | Video Conference                                      | 2                                           |
|             | Alat Studio Video Lainnya                             | 35                                          |
| 1.3.2.6.1.5 | <b>PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH</b> |                                             |
|             | Kompas Geologi                                        | 2                                           |
|             | Alat Studio Pemetaan lainnya                          | 10                                          |
| I           | 1.3.2.6.2                                             | <b>ALAT KOMUNIKASI</b>                      |
|             | 1.3.2.6.2.1                                           | <b>ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE</b>            |
|             | Telephone (PABX)                                      | 1                                           |
|             | Facsimile                                             | 2                                           |
| J           | 1.3.2.10                                              | <b>KOMPUTER</b>                             |
|             | 1.3.2.10.1                                            | <b>KOMPUTER UNIT</b>                        |
|             | 1.3.2.10.1.1                                          | <b>KOMPUTER JARINGAN</b>                    |
|             | Komputer Jaringan lainnya                             | 3                                           |
|             | 1.3.2.10.1.2                                          | <b>PERSONAL KOMPUTER</b>                    |
|             | P.C Unit                                              | 213                                         |
|             | Lap Top                                               | 10                                          |
|             | Note Book                                             | 88                                          |
|             | Tablet PC                                             | 1                                           |
| K           | 1.3.2.10.2                                            | <b>PERALATAN KOMPUTER</b>                   |
|             | 1.3.2.10.2.1                                          | <b>PERALATAN MAINFRAME</b>                  |
|             | Hard Disk                                             | 16                                          |
|             | peralatan mainframe lainnya (dst)                     | 3                                           |
|             | 1.3.2.10.2.3                                          | <b>PERALATAN PERSONAL KOMPUTER</b>          |
|             | Monitor                                               | 27                                          |
|             | Printer (Peralatan Personal Komputer)                 | 186                                         |
|             | Scanner (Peralatan Personal Komputer)                 | 13                                          |

| No           | Nama Barang                                 | Jumlah                              |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|              | External                                    | 15                                  |
|              | Peralatan Personal Komputer lainnya         | 84                                  |
| 1.3.2.10.2.4 | <b>PERALATAN JARINGAN</b>                   |                                     |
|              | Server                                      | 2                                   |
|              | Hub                                         | 1                                   |
|              | Peralatan Jaringan lainnya                  | 51                                  |
| <b>L</b>     | 1.3.2.14                                    | <b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>        |
|              | 1.3.2.14.1                                  | <b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>        |
|              | 1.3.2.14.1.3                                | <b>ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA</b> |
|              | alat bantu eksplorasi lainnya lainnya (dst) | 2                                   |
| <b>M</b>     | 1.3.2.19                                    | <b>PERALATAN OLAH RAGA</b>          |
|              | 1.3.2.19.1                                  | <b>PERALATAN OLAH RAGA</b>          |
|              | 1.3.2.19.1.6                                | <b>PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA</b>  |
|              | Peralatan Olahraga lainnya (dst)            | 2                                   |

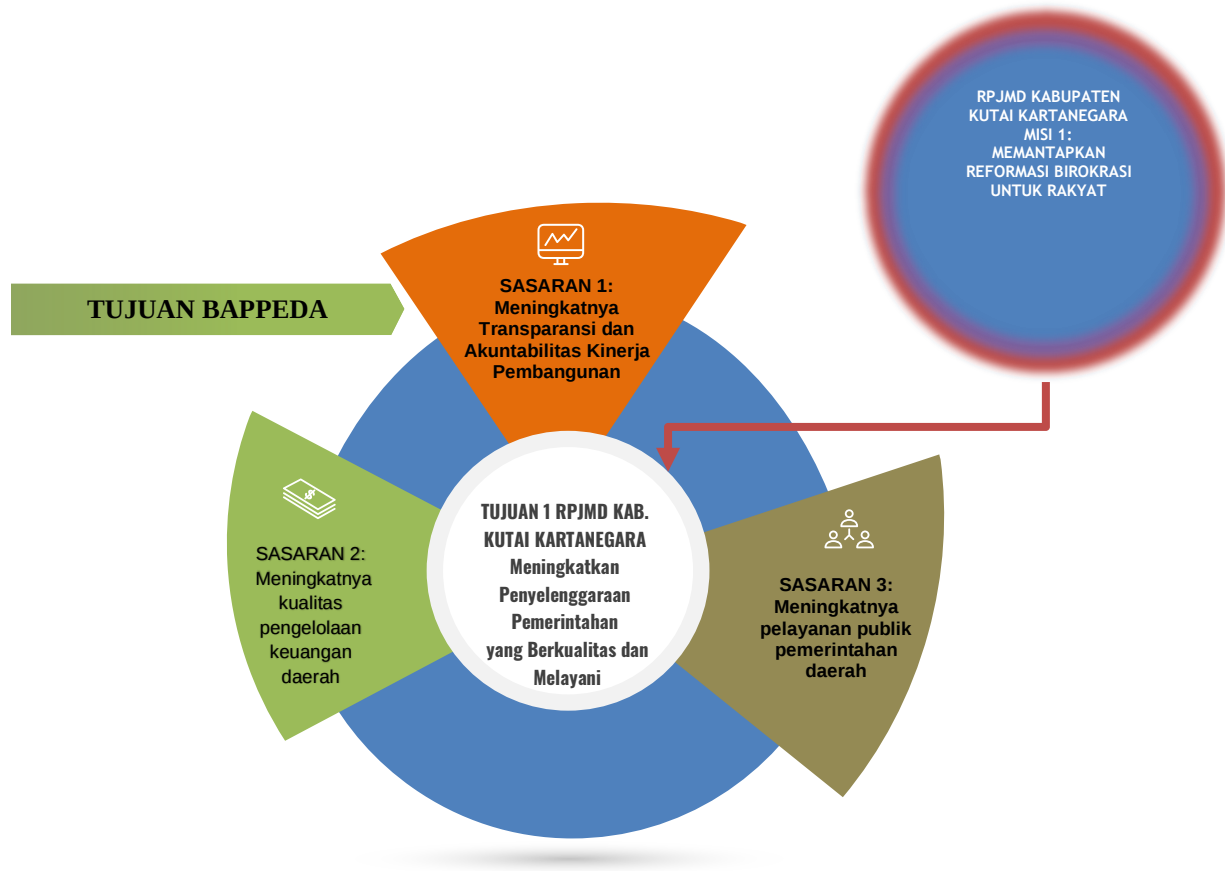
Sumber: Bagian Umum dan Ketatalaksanaan BAPPEDA, 2022

## 1.5. Aspek Strategis Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.

Posisi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung misi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam dokumen RPJMD ke-1 yaitu Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat dalam rangka mewujudkan Good Governance. Pada logframe perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 1 (satu) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, dapat dilihat bahwa BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang sesuai dengan sasaran ke-1 RPJMD yaitu Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dan di “Cascading” menjadi Tujuan dari BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan** dengan indikator kinerja **Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah**. perumusan perencanaan terintegrasi tersebut tergambar dalam logical framework sebagai berikut:

Gambar 3. Logical Framework Aspek Strategis Bappeda Kab. Kutai Kartanegara



### 1.6. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan, dikarenakan dampaknya bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda, yang apabila tidak segera diatasi maka akan menjadi masalah di kemudian hari, isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah;
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran;
5. koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;

6. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.

### 1.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI-P) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

|                |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bab I</b>   | <b>Pendahuluan</b>           | Menjelaskan secara ringkas kondisi umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi                                                 |
| <b>Bab II</b>  | <b>Perencanaan Kinerja</b>   | Menjelaskan secara ringkas dokumen ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021                                                                                                                                                          |
| <b>Bab III</b> | <b>Akuntabilitas Kinerja</b> | Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021. |
| <b>Bab IV</b>  | <b>Penutup</b>               | Menjelaskan simpulan umum atas Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.                    |

### **2.1. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah, yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016–2021 dan diturunkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021. Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

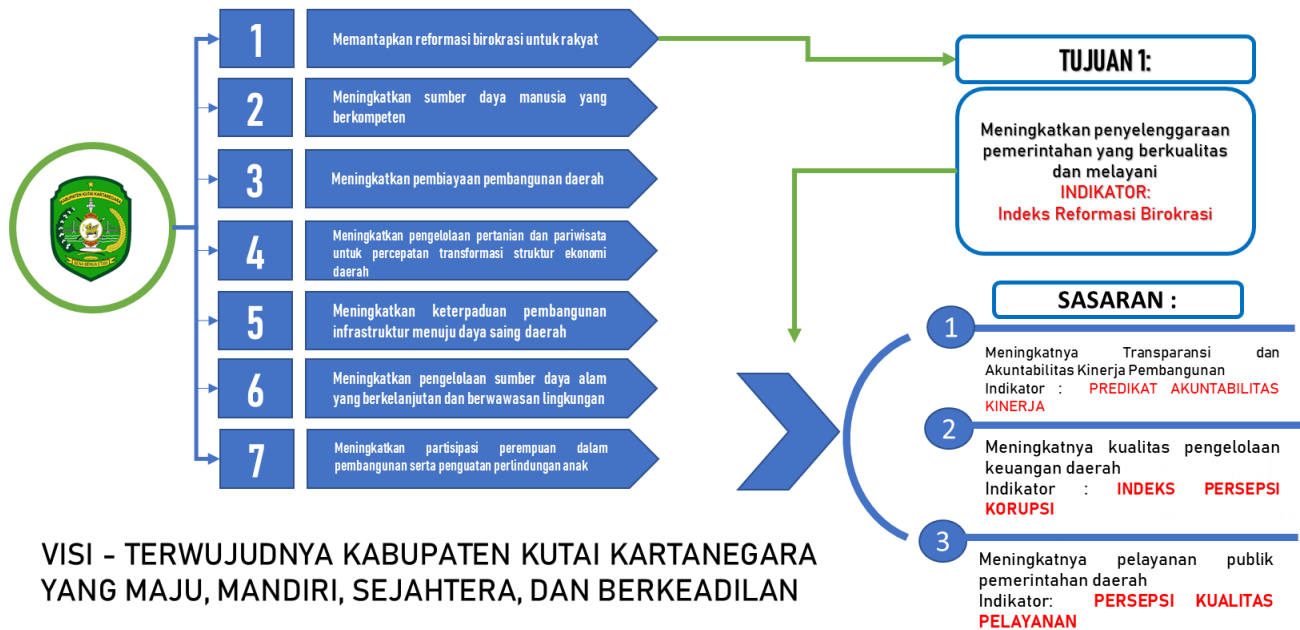
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

### **2.2. Tujuan Dan Sasaran**

#### **2.2.1. Tujuan**

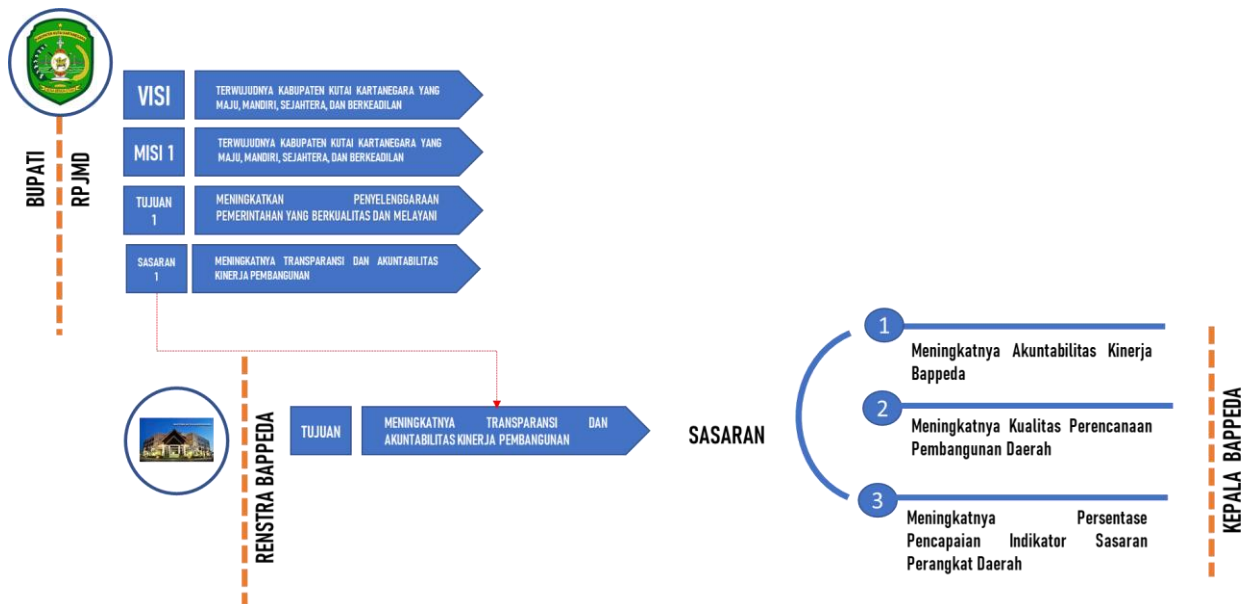
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan Program dan Kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Penetapan tujuan dalam rencana strategis selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Gambar 4. Tujuan Dan Sasaran Misi Ke-1 Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Dalam rangka penyelarasan dan penguatan keterkaitan serta konsistensi perencanaan antara Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan urusan penunjang pemerintah perencanaan, maka perencanaan strategis dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan. Berdasarkan casecading dan penyelarasan antara Misi tujuan dan sasaran daerah dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan maka rumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Cascading Dan Aligment Renstra Bappeda Terhadap RPJMD



Berdasarkan rumusan penyelarasan antara Misi, tujuan dan sasaran daerah, maka rumusan tujuan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “ Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” dengan sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Tahun 2016-2021

| NO. | TUJUAN/SASARAN                                                  | INDIKATOR<br>TUJUAN/ SASARAN                                           | TARGET KINERJA SASARAN<br>PADA TAHUN |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                 |                                                                        | 2017                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2)                                                             | (3)                                                                    | (4)                                  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  |
| 1   | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan | Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah                                  | B                                    | B    | BB   | BB   | A    |
|     | 1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                 | Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                                 | 34,60                                | 65   | 71   | 75   | 82   |
|     | 1.2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah       | Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi | 3                                    | 3    | 2    | 1    | 1    |

| NO. | TUJUAN/SASARAN                                                             | INDIKATOR<br>TUJUAN/ SASARAN                             | TARGET KINERJA SASARAN<br>PADA TAHUN |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                            |                                                          | 2017                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2)                                                                        | (3)                                                      | (4)                                  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  |
|     | 1.3. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah | 80                                   | 82   | 85   | 87   | 90   |

Untuk mencapai target pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut.

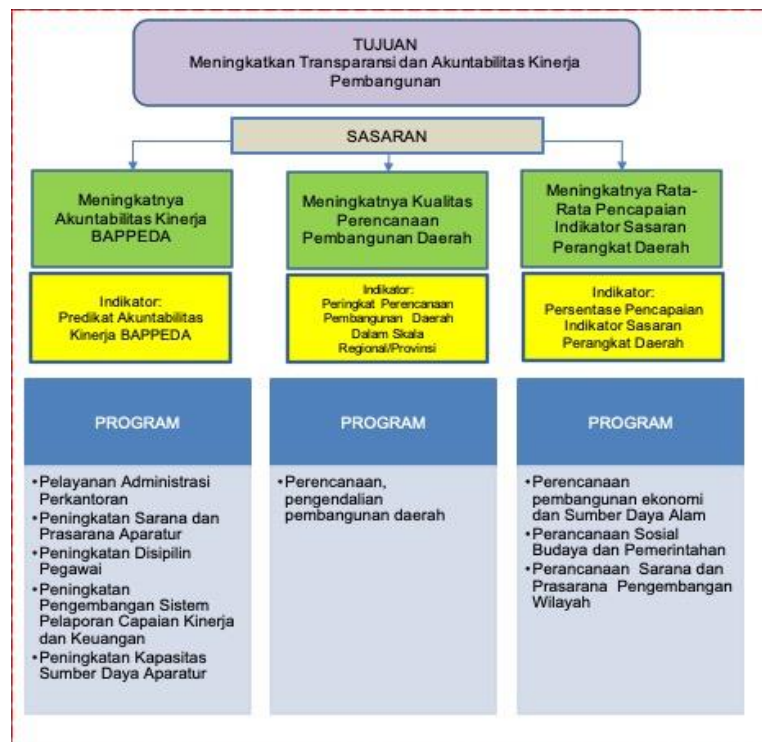
Tabel 3. Cascading Visi-Misi Kabupaten dengan Perencanaan Strategis Bappeda

| VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN |                                                                             |         |                                                                      |                                                                         |          |                                                       |                |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT                                           |                                                                             |         |                                                                      |                                                                         |          |                                                       |                |                                                                                            |
| TUJUAN                                                                                        |                                                                             | SASARAN |                                                                      | INDIKATOR<br>SASARAN                                                    | STRATEGI |                                                       | ARAH KEBIJAKAN |                                                                                            |
| 1                                                                                             | Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan | 1.1.    | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda                           | Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                                  | 1        | Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Pelayanan Publik  | 1              | Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Pelayanan Administrasi                                 |
|                                                                                               |                                                                             |         |                                                                      |                                                                         |          |                                                       | 2              | Peningkatan Kualitas Perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan perangkat daerah |
|                                                                                               |                                                                             | 1.2     | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.                | Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Skala Regional/Provinsi. | 2        | Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu | 1              | Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah                         |
|                                                                                               |                                                                             |         |                                                                      |                                                                         |          |                                                       | 2              | Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran                                              |
|                                                                                               |                                                                             |         |                                                                      |                                                                         |          |                                                       | 3              | Optimalisasi implementasi regulasi sistem perencanaan pembangunan daerah                   |
|                                                                                               |                                                                             |         |                                                                      |                                                                         |          |                                                       | 4              | Membangun sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi                  |
|                                                                                               |                                                                             |         |                                                                      |                                                                         |          |                                                       | 5              | Optimalisasi kerjasama pembangunan                                                         |
|                                                                                               |                                                                             |         |                                                                      |                                                                         |          |                                                       | 6              | Optimalisasi dukungan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah                    |
|                                                                                               |                                                                             | 1.4.    | Meningkatnya Rata-rata Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah                | 3        | Peningkatan capaian kinerja perangkat daerah          | 1              | Optimalisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan SDA                  |
|                                                                                               |                                                                             |         |                                                                      |                                                                         |          |                                                       | 2              | Optimalisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan   |

| VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN |         |                   |          |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT                                           |         |                   |          |                                                                                                       |
| TUJUAN                                                                                        | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                                                                                        |
|                                                                                               |         |                   |          | 3 Optimalisasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana pengembangan wilayah |

Pada tahun 2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut.

Gambar 6. Cascading Program berdasarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah



Pada tahun 2021 dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya, maka terdapat perubahan-perubahan pada program dan kegiatan yang ada di seluruh perangkat daerah, berdasarkan hal tersebut maka program yang berdasarkan cascading diatas di petakan kedalam program kegiatan beserta sub kegiatan ditahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4. Mapping Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Nomenklatur Baru)

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021                   |                                                                        |                                                             |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019                 |                   |                                                                        |                                                             |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020            |                                                                       |                                                                                                                     |                                                             |        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| PROGRAM                                    | KEGIATAN                                                               | INDIKATOR                                                   | TARGET | PROGRAM                                    | KEGIATAN          | SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR                                                   | TARGET | PROGRAM                                    | KEGIATAN                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR                                                   | TARGET |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |                                                                        | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | 100%   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |                   |                                                                        | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |                                                                       |                                                                                                                     |                                                             |        |
|                                            |                                                                        |                                                             |        |                                            | Administrasi Umum |                                                                        |                                                             |        |                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                                     |                                                             |        |
|                                            | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12     |                                            |                   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12     |                                            |                                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12     |
|                                            |                                                                        |                                                             |        |                                            |                   |                                                                        |                                                             |        |                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                     |                                                             |        |
|                                            | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4                               | 9      |                                            |                   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4                               | 9      |                                            |                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4                               | 9      |
|                                            |                                                                        | Jumlah kendaraan dinas roda 2                               | 82     |                                            |                   |                                                                        | jumlah Kendaraan Dinas Roda 2                               | 83     |                                            |                                                                       |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2                               | 83     |
|                                            |                                                                        |                                                             |        |                                            |                   |                                                                        |                                                             |        |                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                                     |                                                             |        |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                          |                                                  |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |          |                                                          |                                                  |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |                                    |                                                          |                                                  |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                                 | INDIKATOR                                        | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                             | INDIKATOR                                        | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN                           | SUB KEGIATAN                                             | INDIKATOR                                        | TARGET |
|                          | Penyediaan jasa kebersihan kantor                        | Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor         | 12     |                            |          | Penyediaan jasa kebersihan kantor                        | Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor         | 12     |                                 |                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor         | 12     |
|                          |                                                          |                                                  |        |                            |          |                                                          |                                                  |        |                                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |                                                          |                                                  |        |
|                          | Penyediaan makanan dan minuman                           | Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan | 2,080  |                            |          | Penyediaan makanan dan minuman                           | Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan | 2,080  |                                 |                                    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan | 2090   |
|                          |                                                          | Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan | 9,500  |                            |          |                                                          | Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan | 9,500  |                                 |                                    |                                                          | Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan | 9500   |
|                          |                                                          |                                                  |        |                            |          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Bahan Logistik                            | 9      |                                 |                                    |                                                          | Jumlah Bahan Logistik                            | 9      |
|                          | Penyediaan alat tulis kantor                             | Jumlah Jasa Perkantoran ATK yang disediakan      | 12     |                            |          | Penyediaan alat tulis kantor                             | Jumlah Jasa Perkantoran ATK yang disediakan      | 12     |                                 |                                    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan         | 48     |
|                          | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | Jumlah penggandaan                               | 36500  |                            |          | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | Jumlah penggandaan                               | 70,000 |                                 |                                    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah penggandaan                               | 70000  |
|                          |                                                          | Jumlah Cetakan                                   | 1276   |                            |          |                                                          | Jumlah Cetakan                                   | 1,276  |                                 |                                    |                                                          | Jumlah Cetakan                                   | 1276   |
|                          | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1. Jumlah bacaan yang disediakan                 | 3000   |                            |          | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1. Jumlah bacaan yang disediakan                 | 3,000  |                                 |                                    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1. Jumlah bacaan yang disediakan                 | 3000   |
|                          |                                                          | 2. Jumlah Kontrak Advetorial                     | 9      |                            |          |                                                          | 2. Jumlah Kontrak Advetorial                     | 9      |                                 |                                    |                                                          | 2. Jumlah Kontrak Advetorial                     | 9      |
|                          | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam           | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi           | 150    |                            |          | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah     | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi           | 150    |                                 |                                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi           | 150    |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021                          |                                                 |                                                         |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |          |                                       |                                                  |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |                                                                  |                                       |                                                  |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| PROGRAM                                           | KEGIATAN                                        | INDIKATOR                                               | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR                                        | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN                                                         | SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR                                        | TARGET |
|                                                   | daerah dan ke luar daerah                       |                                                         |        |                            |          |                                       |                                                  |        |                                 |                                                                  |                                       |                                                  |        |
|                                                   |                                                 |                                                         |        |                            |          |                                       |                                                  |        |                                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                       |                                                  |        |
|                                                   | Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran | Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS        | 12     |                            |          | Penyediaan jasa administrasi Keuangan | Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS | 12     |                                 |                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS | 12     |
|                                                   |                                                 |                                                         |        |                            |          |                                       |                                                  |        |                                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                       |                                                  |        |
|                                                   | Penataan Arsip Perangkat Daerah                 | Jumlah layanan arsip record center                      | 1      |                            |          | Penyediaan jasa surat menyurat        | Jumlah layanan arsip record center               | 1      |                                 |                                                                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah layanan arsip record center               | 1      |
|                                                   |                                                 | Jumlah layanan arsip file center                        | 5      |                            |          |                                       | Jumlah layanan arsip file center                 | 5      |                                 |                                                                  |                                       | Jumlah layanan arsip file center                 | 5      |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |                                                 | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik |        |                            |          |                                       |                                                  |        |                                 |                                                                  |                                       |                                                  |        |
|                                                   |                                                 |                                                         |        |                            |          |                                       |                                                  |        |                                 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                       |                                                  |        |
|                                                   | Pengadaan peralatan gedung kantor               | Jumlah peralatan gedung kantor                          | 7      |                            |          | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor     | Jumlah peralatan gedung kantor                   | 57     |                                 |                                                                  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor                   | 57     |
|                                                   |                                                 |                                                         |        |                            |          | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  | Jumlah perlengkapan gedung kantor                | 56     |                                 |                                                                  |                                       | Jumlah perlengkapan gedung kantor                | 56     |
|                                                   |                                                 |                                                         |        |                            |          | Pengadaan Mebeleur                    | Jumlah Mebeleur yang diadakan                    | 2      |                                 |                                                                  | Pengadaan Mebel                       | Jumlah Mebeleur yang diadakan                    | 2      |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                        |                                                |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |          |                                                                  |                                                      |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |                                                                       |                                                                                                                 |                                                      |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                               | INDIKATOR                                      | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR                                            | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR                                            | TARGET |
|                          |                                                        |                                                |        |                            |          |                                                                  |                                                      |        |                                 |                                                                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor                | 1      |
|                          |                                                        |                                                |        |                            |          |                                                                  |                                                      |        |                                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                 |                                                      |        |
|                          | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Di Pelihara | 1      |                            |          | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         | Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara        | 1      |                                 |                                                                       | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                    | 12     |
|                          |                                                        |                                                |        |                            |          |                                                                  |                                                      |        |                                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                                                 |                                                      |        |
|                          |                                                        |                                                |        |                            |          | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis pemeliharaan jaringan instalasi listrik | 2      |                                 |                                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah jenis pemeliharaan jaringan instalasi listrik | 2      |
|                          |                                                        |                                                |        |                            |          |                                                                  |                                                      |        |                                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                 |                                                      |        |
|                          | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan operasional                   | 7      |                            |          | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | Jumlah kendaraan operasional                         | 7      |                                 |                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional      | 28     |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021                           |                                                    |                                             |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |                                                         |                                                    |                                             |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |                                           |                                                                                                                     |                                                     |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| PROGRAM                                            | KEGIATAN                                           | INDIKATOR                                   | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR                                   | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR                                           | TARGET |
|                                                    | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan           | Jumlah kendaraan jabatan                    | 2      |                            |                                                         | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan           | Jumlah kendaraan jabatan                    | 2      |                                 |                                           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2                       | 83     |
|                                                    |                                                    |                                             |        |                            |                                                         |                                                    |                                             |        |                                 |                                           |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4                       | 9      |
|                                                    |                                                    |                                             |        |                            |                                                         |                                                    |                                             |        |                                 |                                           |                                                                                                                     | Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan                   | 8      |
|                                                    | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor | 12     |                            |                                                         | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor | 9      |                                 |                                           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor | 144    |
|                                                    |                                                    |                                             |        |                            |                                                         | Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur                | Jumlah jenis yang dipelihara                | 3      |                                 |                                           | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Jumlah jenis Mebeleur yang dipelihara               | 3      |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur              |                                                    | Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN |        |                            | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |                                                    |                                             |        |                                 |                                           |                                                                                                                     |                                                     |        |
|                                                    |                                                    |                                             |        |                            |                                                         |                                                    |                                             |        |                                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                                                                                                                     |                                                     |        |
|                                                    | Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Bappeda    | Jumlah sistem Informasi                     | 1      |                            |                                                         |                                                    |                                             |        |                                 |                                           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | Jumlah Aplikasi                                     | 3      |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |                                                    | Rata-Rata Nilai Kinerja SKP                 |        |                            | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |                                                    |                                             |        |                                 |                                           |                                                                                                                     |                                                     |        |
|                                                    |                                                    |                                             |        |                            |                                                         |                                                    |                                             |        |                                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                                                                                                                     |                                                     |        |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021                                                       |                                                                 |                                                        |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |                                                   |                                                            |                                                        |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |                                                   |                                                            |                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                                                                        | KEGIATAN                                                        | INDIKATOR                                              | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN                                          | SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR                                              | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN                                          | SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR      | TARGET |
|                                                                                | Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen                                         | 1      |                            |                                                   | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                   | Jumlah ASN (Agen Perubahan)                            | 16     |                                 |                                                   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        | Jumlah Dokumen | 1      |
|                                                                                |                                                                 |                                                        |        |                            |                                                   |                                                            |                                                        |        |                                 |                                                   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Jumlah ASN     | 16     |
|                                                                                | BIMTEK Perencanaan Pembangunan Daerah                           | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, kursus dan bimtek | 50     |                            |                                                   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, kursus dan bimtek | 50     |                                 |                                                   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN     | 50     |
|                                                                                | Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, kursus dan bimtek | 50     |                            |                                                   |                                                            |                                                        |        |                                 |                                                   |                                                            |                |        |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                 | 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;           |        |                            |                                                   |                                                            |                                                        |        |                                 |                                                   |                                                            |                |        |
|                                                                                |                                                                 | 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;       |        |                            |                                                   |                                                            |                                                        |        |                                 |                                                   |                                                            |                |        |
|                                                                                |                                                                 | 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit               |        |                            |                                                   |                                                            |                                                        |        |                                 |                                                   |                                                            |                |        |
|                                                                                |                                                                 |                                                        |        |                            | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                            |                                                        |        |                                 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                            |                |        |
|                                                                                | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Bappeda                       | Jumlah Dokumen                                         | 12     |                            |                                                   | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen                                         | 12     |                                 |                                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah            | Jumlah Dokumen | 10     |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021                             |                                                             |                                                  |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019                                        |                       |                                              |                                                  |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020                                   |                                                        |                                                                             |                                 |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| PROGRAM                                              | KEGIATAN                                                    | INDIKATOR                                        | TARGET | PROGRAM                                                           | KEGIATAN              | SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR                                        | TARGET | PROGRAM                                                           | KEGIATAN                                               | SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR                       | TARGET |
|                                                      | Penyusunan Renstra SKPD                                     | Jumlah dokumen                                   | 1      |                                                                   |                       |                                              |                                                  |        |                                                                   |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen                  | 2      |
|                                                      | Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja PD Bappeda | Jumlah Dokumen                                   | 8      |                                                                   |                       | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen                                   | 8      |                                                                   |                                                        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen                  | 2      |
|                                                      |                                                             |                                                  |        |                                                                   |                       |                                              |                                                  |        |                                                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                                                                             |                                 |        |
|                                                      | Publikasi Perencanaan Pembangunan                           | Jumlah Event yang diikuti                        | 2      |                                                                   |                       |                                              |                                                  |        |                                                                   |                                                        | Penyediaan Bahan/Material                                                   | Jumlah material yang disediakan | 15     |
|                                                      |                                                             |                                                  |        |                                                                   | Administrasi Keuangan |                                              |                                                  |        |                                                                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 |                                                                             |                                 |        |
|                                                      | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah                    | Jumlah dokumen laporan keuangan                  | 1      |                                                                   |                       | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  | Jumlah dokumen laporan keuangan                  | 1      |                                                                   |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen                  | 5      |
|                                                      |                                                             |                                                  |        |                                                                   |                       |                                              |                                                  |        |                                                                   |                                                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Tersedianya Gaji dan Tunjangan  | 12     |
|                                                      |                                                             |                                                  |        |                                                                   |                       |                                              |                                                  |        |                                                                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |                                                                             |                                 |        |
|                                                      | Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah                | Jumlah dokumen laporan BMD                       | 5      |                                                                   |                       | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  | Jumlah dokumen laporan BMD                       | 5      |                                                                   |                                                        | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                 | Jumlah Dokumen                  | 3      |
| Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah |                                                             | 1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD; |        | Program perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah |                       |                                              | 1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD; |        | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |                                                        |                                                                             |                                 |        |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                  |                                                  |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |                                           |                                                                                                                                    |                                                                   |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |                                      |                                                                                           |                                                                                |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                         | INDIKATOR                                        | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                       | INDIKATOR                                                         | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN                             | SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR                                                                      | TARGET |
|                          |                                                  | 2) Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD |        |                            |                                           |                                                                                                                                    | 2) Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD                  |        |                                 |                                      |                                                                                           |                                                                                |        |
|                          |                                                  |                                                  |        |                            | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                                                                                    |                                                                   |        |                                 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |                                                                                           |                                                                                |        |
|                          | Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD | Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD           | 2      |                            |                                           | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota                                | Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati                      | 3      |                                 |                                      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD, RPJMD dan Perubahan RKPD) | 3      |
|                          | Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD                    | Jumlah Dokumen                                   | 1      |                            |                                           |                                                                                                                                    |                                                                   |        |                                 |                                      |                                                                                           |                                                                                |        |
|                          |                                                  |                                                  |        |                            |                                           |                                                                                                                                    |                                                                   |        |                                 |                                      | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                             | Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik                                           | 2      |
|                          | Penyusunan RPJMD kabupaten Kutai Kartanegara     | Jumlah Dokumen RPJMD                             | 1      |                            |                                           | Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                   | Jumlah pelaksanaan Musrenbang                                     | 3      |                                 |                                      | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah pelaksanaan Musrenbang                                                  | 3      |
|                          |                                                  |                                                  |        |                            |                                           | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 3      |                                 |                                      | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD                                             | Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah              | 3      |
|                          |                                                  |                                                  |        |                            |                                           | Pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya | Jumlah dokumen                                                    | 1      |                                 |                                      | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                           | Jumlah dokumen                                                                 | 18     |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                                      |                                                                                     |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |                                                                            |                                                                     |                |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |                                                                                       |                                                                                               |                                                      |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                                             | INDIKATOR                                                                           | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                   | SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR                                            | TARGET |
|                          | Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah                      | Jumlah pendampingan sistem informasi perencanaan daerah                             | 58     |                            |                                                                            | Identifikasi permasalahan pembangunan daerah                        | Jumlah dokumen | 1      |                                 |                                                                                       | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah penerapan sistem informasi perencanaan daerah | 1      |
|                          |                                                                      | Jumlah penerapan sistem informasi perencanaan daerah                                | 1      |                            |                                                                            |                                                                     |                |        |                                 |                                                                                       |                                                                                               | Jumlah OPD                                           | 58     |
|                          |                                                                      |                                                                                     |        |                            | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                     |                |        |                                 |                                                                                       |                                                                                               |                                                      |        |
|                          | Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara | 8      |                            |                                                                            | Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah             | Jumlah dokumen | 2      |                                 |                                                                                       |                                                                                               |                                                      |        |
|                          |                                                                      |                                                                                     |        |                            |                                                                            | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah        | Jumlah dokumen | 1      |                                 |                                                                                       |                                                                                               |                                                      |        |
|                          |                                                                      |                                                                                     |        |                            |                                                                            | Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen | 1      |                                 |                                                                                       |                                                                                               |                                                      |        |
|                          |                                                                      |                                                                                     |        |                            |                                                                            |                                                                     |                |        |                                 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                                               |                                                      |        |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                               |                                               |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |          |                                                                                              |                                         |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |          |                                                                                          |                                                   |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                                      | INDIKATOR                                     | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR                               | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR                                         | TARGET |
|                          | Pengelolaan dan Pemeliharaan Studio Data Pembangunan Daerah   | Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan       | 3      |                            |          | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah                                            | Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan | 3      |                                 |          | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                               | Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)          | 3      |
|                          |                                                               |                                               |        |                            |          | Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah | Jumlah dokumen                          | 1      |                                 |          | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah dokumen                                    | 1      |
|                          |                                                               |                                               |        |                            |          |                                                                                              |                                         |        |                                 |          | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                | Jumlah Pendampingan ketersediaan data (32 Urusan) | 32     |
|                          |                                                               |                                               |        |                            |          |                                                                                              |                                         |        |                                 |          | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               |                                                   |        |
|                          | Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah    | Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD | 2      |                            |          | Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah                                             | Jumlah dokumen                          | 2      |                                 |          | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen                                    | 8      |
|                          | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |                                               |        |                            |          | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM                                                | Jumlah dokumen                          | 1      |                                 |          | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Jumlah Laporan Monev                              | 4      |
|                          |                                                               |                                               |        |                            |          | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah                                           | Jumlah dokumen                          | 1      |                                 |          | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah                                                | Jumlah Laporan Pengendalian                       | 1      |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021                                     |                                                       |                                                                                                                     |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019                            |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020                                    |                                                                       |                                                                                                 |                |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                                                      | KEGIATAN                                              | INDIKATOR                                                                                                           | TARGET | PROGRAM                                               | KEGIATAN                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                           | TARGET | PROGRAM                                                            | KEGIATAN                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR      | TARGET |
|                                                              |                                                       |                                                                                                                     |        |                                                       |                                                                                                              | Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah                                                              | Jumlah dokumen                                                                                                      | 1      |                                                                    |                                                                       |                                                                                                 |                |        |
| Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam |                                                       | Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam |        | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |                                                                                                              |                                                                                                              | Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam |        | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                       |                                                                                                 |                |        |
|                                                              |                                                       |                                                                                                                     |        |                                                       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam |                                                                                                              |                                                                                                                     |        |                                                                    | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |                                                                                                 |                |        |
|                                                              | Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan SDA dan Pertanian |                                                                                                                     | 5      |                                                       |                                                                                                              | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen                                                                                                      | 5      |                                                                    |                                                                       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen | 5      |
|                                                              |                                                       |                                                                                                                     |        |                                                       |                                                                                                              | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam  | Jumlah dokumen                                                                                                      | 5      |                                                                    |                                                                       | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                | Jumlah dokumen | 5      |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                                                           |           |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |                                                                            |                                                                                                                                       |                |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |          |                                                                                                            |                |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                          | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR      | TARGET |
|                          |                                                                                           |           |        |                            |                                                                            | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen | 5      |                                 |          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen | 5      |
|                          |                                                                                           |           |        |                            |                                                                            |                                                                                                                                       |                |        |                                 |          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                | Jumlah dokumen | 5      |
|                          |                                                                                           |           |        |                            | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif |                                                                                                                                       |                |        |                                 |          |                                                                                                            |                |        |
|                          | Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan |           | 3      |                            |                                                                            | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif                           | Jumlah Dokumen | 3      |                                 |          |                                                                                                            |                |        |
|                          |                                                                                           |           |        |                            |                                                                            | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif                            | Jumlah Dokumen | 3      |                                 |          |                                                                                                            |                |        |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                                    |           |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |                                                                         |                                                                                                                                      |                |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |          |                                                                                                                     |                |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                                           | INDIKATOR | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR      | TARGET |
|                          |                                                                    |           |        |                            |                                                                         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen | 3      |                                 |          |                                                                                                                     |                |        |
|                          |                                                                    |           |        |                            | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian |                                                                                                                                      |                |        |                                 |          |                                                                                                                     |                |        |
|                          | Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Regional dan Keuangan Daerah |           | 3      |                            |                                                                         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian                             | Jumlah Dokumen | 3      |                                 |          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah dokumen | 6      |
|                          |                                                                    |           |        |                            |                                                                         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian                              | Jumlah Dokumen | 3      |                                 |          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah dokumen | 6      |
|                          |                                                                    |           |        |                            |                                                                         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan                              | Jumlah Dokumen | 3      |                                 |          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen | 6      |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021                           |                                                                                  |                                                                                                                       |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019                  |                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |                                                                    |                                                                                                          |                |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                                            | KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR                                                                                                             | TARGET | PROGRAM                                     | KEGIATAN                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                      | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR      | TARGET |
|                                                    |                                                                                  |                                                                                                                       |        |                                             |                                                                         | RKPD) Bidang Perekonomian                                                                                |                                                                                                                |        |                                 |                                                                    |                                                                                                          |                |        |
|                                                    |                                                                                  |                                                                                                                       |        |                                             |                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                |        |                                 |                                                                    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian     | Jumlah dokumen | 6      |
|                                                    | Analisis Data Ekonomi Makro                                                      | Jumlah Dokumen                                                                                                        | 1      |                                             |                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                |        |                                 |                                                                    |                                                                                                          |                |        |
| Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan |                                                                                  | Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan |        | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA |                                                                         |                                                                                                          | Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Sosial Budaya dan Pemerintahan |        |                                 |                                                                    |                                                                                                          |                |        |
|                                                    |                                                                                  |                                                                                                                       |        |                                             | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan |                                                                                                          |                                                                                                                |        |                                 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |                                                                                                          |                |        |
|                                                    | Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur | Jumlah dokumen                                                                                                        | 13     |                                             |                                                                         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen                                                                                                 | 12     |                                 |                                                                    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen | 13     |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                                                       |                |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |                                                                                       |                                                                                                                                   |                |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |          |                                                                                                                     |                |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                      | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR      | TARGET |
|                          |                                                                                       |                |        |                            |                                                                                       | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan                           | Jumlah dokumen | 12     |                                 |          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Dokumen | 13     |
|                          |                                                                                       |                |        |                            |                                                                                       | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen | 12     |                                 |          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen | 13     |
|                          | Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi                                                    | Jumlah dokumen | 1      |                            |                                                                                       | Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi                                                                                                | Jumlah dokumen | 1      |                                 |          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Dokumen | 1      |
|                          |                                                                                       |                |        |                            | <b>Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia</b> |                                                                                                                                   |                |        |                                 |          |                                                                                                                     |                |        |
|                          | Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan | Jumlah dokumen | 3      |                            |                                                                                       | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia                   | Jumlah dokumen | 3      |                                 |          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | Jumlah Dokumen | 9      |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                                                  |                |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |                                                                                     |                                                                                                                                          |                |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |          |                                                                                                                            |                |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                             | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                               | INDIKATOR      | TARGET |
|                          |                                                                                  |                |        |                            |                                                                                     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah dokumen | 3      |                                 |          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Dokumen | 9      |
|                          |                                                                                  |                |        |                            |                                                                                     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen | 3      |                                 |          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen | 9      |
|                          |                                                                                  |                |        |                            | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat |                                                                                                                                          |                |        |                                 |          |                                                                                                                            |                |        |
|                          | Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sosial Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen | 6      |                            |                                                                                     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat                     | Jumlah dokumen | 6      |                                 |          |                                                                                                                            |                |        |
|                          |                                                                                  |                |        |                            |                                                                                     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang                                               | Jumlah dokumen | 6      |                                 |          |                                                                                                                            |                |        |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                            |                                       |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |          |                                                                                                                                               |                |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020                                    |                                      |                                                                                                             |                |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                                   | INDIKATOR                             | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                                                            | KEGIATAN                             | SUB KEGIATAN                                                                                                | INDIKATOR      | TARGET |
|                          |                                                            |                                       |        |                            |          | Kesejahteraan Masyarakat                                                                                                                      |                |        |                                                                    |                                      |                                                                                                             |                |        |
|                          |                                                            |                                       |        |                            |          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah dokumen | 6      |                                                                    |                                      |                                                                                                             |                |        |
|                          |                                                            |                                       |        |                            |          | Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)                                                                                    | Jumlah dokumen | 1      |                                                                    |                                      |                                                                                                             |                |        |
|                          | Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) | Jumlah dokumen                        | 1      |                            |          |                                                                                                                                               |                |        |                                                                    |                                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen | 1      |
|                          |                                                            |                                       |        |                            |          |                                                                                                                                               |                |        | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                      |                                                                                                             |                |        |
|                          |                                                            |                                       |        |                            |          |                                                                                                                                               |                |        |                                                                    | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |                                                                                                             |                |        |
|                          | Fasilitasi Dewan Riset Daerah                              | Jumlah Rekomendasi Dewan Riset Daerah | 10     |                            |          |                                                                                                                                               |                |        |                                                                    |                                      | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis                                                    | Jumlah dokumen | 1      |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021                                      |                                                             |                                                                                                                                  |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019                        |                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |                                                             |                                                                                                           |                |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                                                       | KEGIATAN                                                    | INDIKATOR                                                                                                                        | TARGET | PROGRAM                                           | KEGIATAN                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                        | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR      | TARGET |
|                                                               |                                                             |                                                                                                                                  |        |                                                   |                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |        |                                 |                                                             | Pembangunan Daerah                                                                                        |                |        |
| Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah |                                                             | Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah |        | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN |                                                                                           |                                                                                                                            | Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah |        |                                 |                                                             |                                                                                                           |                |        |
|                                                               |                                                             |                                                                                                                                  |        |                                                   | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |        |                                 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                                                                                                           |                |        |
|                                                               | Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah | Jumlah Dokumen                                                                                                                   | 2      |                                                   |                                                                                           | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan | Jumlah Dokumen                                                                                                                   | 2      |                                 |                                                             | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen | 5      |
|                                                               |                                                             |                                                                                                                                  |        |                                                   |                                                                                           | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinarmargaan dan Perhubungan  | Jumlah Dokumen                                                                                                                   | 2      |                                 |                                                             | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Dokumen | 5      |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                                       |                |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |          |                                                                                                                      |                |        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                                              | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                       | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR      | TARGET |
|                          |                                                                       |                |        |                            |                                                                                                 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Jumlah Dokumen | 2      |                                 |          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen | 5      |
|                          |                                                                       |                |        |                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |        |                                 |          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Dokumen | 5      |
|                          |                                                                       |                |        |                            | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup |                                                                                                                                                    |                |        |                                 |          |                                                                                                                      |                |        |
|                          | Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman | Jumlah Dokumen | 2      |                            |                                                                                                 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup                   | Jumlah Dokumen | 3      |                                 |          |                                                                                                                      |                |        |
|                          |                                                                       |                |        |                            |                                                                                                 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,                                                                                | Jumlah Dokumen | 3      |                                 |          |                                                                                                                      |                |        |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |                                                                     |                |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |                                                                      |                                                                                                                                                           |                |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |          |                                                                                                       |                |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN                                                            | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN                                                             | SUB KEGIATAN                                                                                                                                              | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR      | TARGET |
|                          |                                                                     |                |        |                            |                                                                      | RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup                                                                                               |                |        |                                 |          |                                                                                                       |                |        |
|                          |                                                                     |                |        |                            |                                                                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen | 3      |                                 |          |                                                                                                       |                |        |
|                          |                                                                     |                |        |                            | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayah |                                                                                                                                                           |                |        |                                 |          |                                                                                                       |                |        |
|                          | Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen | 18     |                            |                                                                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayah                                                     | Jumlah dokumen | 18     |                                 |          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen | 18     |
|                          |                                                                     |                |        |                            |                                                                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayah                                                      | Jumlah dokumen | 18     |                                 |          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah                | Jumlah Dokumen | 18     |

| RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 |          |           |        | PERMENDAGRI 090 TAHUN 2019 |          |                                                                                                                                                    |                |        | KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 |          |                                                                                                                    |                |        |
|--------------------------|----------|-----------|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| PROGRAM                  | KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | PROGRAM                    | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                                                       | INDIKATOR      | TARGET | PROGRAM                         | KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR      | TARGET |
|                          |          |           |        |                            |          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahaa n dan Kewilayahan | Jumlah dokumen | 18     |                                 |          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Dokumen | 18     |
|                          |          |           |        |                            |          |                                                                                                                                                    |                |        |                                 |          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Jumlah Dokumen | 18     |

### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam sasaran terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 5. IKU Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

| NO. | SASARAN                                                               | INDIKATOR SASARAN                                                      | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN |      |      |      |      | KETERANGAN              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|
|     |                                                                       |                                                                        | 2017                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |                         |
| (1) | (2)                                                                   | (3)                                                                    | (4)                               | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)                     |
| 1   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                            | Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                                 | 34,60                             | 65   | 71   | 75   | 82   | Indikator Kinerja Utama |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                  | Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi | 3                                 | 3    | 2    | 1    | 1    | Indikator Kinerja Utama |
| 3   | Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah               | 80                                | 82   | 85   | 87   | 90   | Indikator Kinerja Utama |

## 2.4. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Adapun Program Kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai dengan nomenklatur baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2021

| No         | Program/ Kegiatan Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Satuan  | Rencana Kinerja Tahun 2021 |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|
|            |                                                                               |                                     |         | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja |
| 1          | 2                                                                             | 3                                   | 4       | 5                          | 6                      |
| <b>I</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>            |                                     |         |                            |                        |
| <b>I.1</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       |                                     |         |                            |                        |
| 1          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 9                      |
| 2          | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 4                      |
| 3          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 6                      |
| <b>I.2</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 |                                     |         |                            |                        |
| 4          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Tersedianya Gaji dan Tunjangan      | bulan   | Tenggarong                 | 12                     |
| 5          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 5                      |
| <b>I.3</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 |                                     |         |                            |                        |
| 6          | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 2                      |
| <b>I.4</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              |                                     |         |                            |                        |
| 7          | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 1                      |
| 8          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN                          | orang   | Tenggarong                 | 50                     |
| <b>I.5</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     |                                     |         |                            |                        |

| No         | Program/ Kegiatan Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                            | Satuan     | Rencana Kinerja Tahun 2021 |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|
|            |                                                                              |                                                                |            | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja |
| 9          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan                       | Jenis      | Tenggarong                 | 48                     |
| 10         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disediakan | Jenis      | Tenggarong                 | 7                      |
|            |                                                                              | Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan       | Kotak      | Tenggarong                 | 6210                   |
|            |                                                                              | Jumlah bahan logistik                                          | Jenis      | Tenggarong                 | 9                      |
| 11         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Cetakan                                                 | Lembar     | Tenggarong                 | 1276                   |
|            |                                                                              | Jumlah Penggandaan                                             | Lembar     | Tenggarong                 | 50130                  |
|            |                                                                              | Jumlah cetakan kalender                                        | Buah       | Tenggarong                 | 174                    |
| 12         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah bacaan yang disediakan                                  | Eksemplar  | Tenggarong                 | 2,493                  |
|            |                                                                              | Jumlah Kontrak Advetorial                                      | Advetorial | Tenggarong                 | 2                      |
| 13         | Penyediaan Bahan/Material                                                    | Jumlah Bahan Pendukung Pameran/Even                            | Jenis      | Tenggarong                 | 0                      |
| 14         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi                         | Kali       | Tenggarong                 | 150                    |
| 15         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah layanan arsip file center                               | Unit       | Tenggarong                 | 5                      |
|            |                                                                              | Jumlah layanan arsip record center                             | Unit       | Tenggarong                 | 1                      |
| 16         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah aplikasi                                                | Aplikasi   | Tenggarong                 | 1                      |
| <b>I.6</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                                                                |            |                            |                        |
| 17         | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Mebeleur yang diadakan                                  | Jenis      | Tenggarong                 | 1                      |
|            |                                                                              | Jumlah Interior Center                                         | Paket      | Tenggarong                 | 2                      |
| 18         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah peralatan gedung kantor                                 | Jenis      | Tenggarong                 | 21                     |
| 19         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor                          | Unit       | Tenggarong                 | 1                      |
| <b>I.7</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                |            |                            |                        |
| 20         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah layanan jasa komunikasi,                                | Bulan      | Tenggarong                 | 12                     |

| No         | Program/ Kegiatan Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                 | Satuan   | Rencana Kinerja Tahun 2021 |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------|
|            |                                                                                                                    |                                                     |          | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja |
|            |                                                                                                                    | sumber daya air dan listrik                         |          |                            |                        |
| 21         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS    | Bulan    | Tenggarong                 | 12                     |
|            |                                                                                                                    | Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor            | Bulan    | Tenggarong                 | 12                     |
| <b>I.8</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                                     |          |                            |                        |
| 22         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas roda dua                     | Unit     | Tenggarong                 | 15                     |
|            |                                                                                                                    | Jumlah kendaraan dinas roda empat                   | Unit     | Tenggarong                 | 6                      |
| 23         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas roda dua                     | Unit     | Tenggarong                 | 25                     |
|            |                                                                                                                    | Jumlah kendaraan dinas roda empat                   | Unit     | Tenggarong                 | 3                      |
| 24         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                   | Kali     | Tenggarong                 | 39                     |
| 25         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor | Kali     | Tenggarong                 | 132                    |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                           |                                                     |          |                            |                        |
| <b>I.9</b> | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                                        |                                                     |          |                            |                        |
| 26         | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                        | Jumlah dokumen                                      | Dokumen  | Tenggarong                 | 1                      |
| 27         | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                      | Jumlah OPD                                          | OPD      | Tenggarong                 | 58                     |
|            |                                                                                                                    | Jumlah Penerapan Sistem                             | Aplikasi | Tenggarong                 | 1                      |
|            |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen                                      | Dokumen  | Tenggarong                 | 1                      |
| 28         | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                      | Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik                | Kali     | Tenggarong                 | 2                      |
| 29         | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD                                                                      | Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat                  | Forum    | Tenggarong                 | 3                      |

| No          | Program/ Kegiatan Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan               | Satuan  | Rencana Kinerja Tahun 2021 |                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                     |                                                   |         | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja |
|             |                                                                                                                     | Daerah/Lintas Perangkat Daerah                    |         |                            |                        |
| 30          | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah pelaksanaan Musrenbang                     | Kali    | Tenggarong                 | 2                      |
| 31          | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                     | Jumlah Dokumen                                    | Dokumen | Tenggarong                 | 18                     |
| 32          | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah dokumen                                    | Dokumen | Tenggarong                 | 3                      |
| <b>I.10</b> | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                        |                                                   |         |                            |                        |
| 33          | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          | Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)          | dokumen | Tenggarong                 | 3                      |
| 34          | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                                           | Jumlah Pendampingan Ketersediaan Data (32 Urusan) | Urusan  | Tenggarong                 | 32                     |
|             |                                                                                                                     | Jumlah dokumen                                    | dokumen | Tenggarong                 | 1                      |
| 35          | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah dokumen                                    | dokumen | Tenggarong                 | 1                      |
| <b>I.11</b> | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                   |                                                   |         |                            |                        |
| 36          | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                            | Jumlah dokumen                                    | dokumen | Tenggarong                 | 8                      |
| 37          | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Monev                              | dokumen | Tenggarong                 | 4                      |
| <b>III</b>  | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                           |                                                   |         |                            |                        |
| <b>I.12</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                           |                                                   |         |                            |                        |
| 38          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah dokumen                                    | dokumen | Tenggarong                 | 13                     |
| 39          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen                                    | dokumen | Tenggarong                 | 13                     |

| No          | Program/ Kegiatan Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Satuan  | Rencana Kinerja Tahun 2021 |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                            |                                     |         | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja |
| 40          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 1                      |
| 41          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 12                     |
| 42          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 12                     |
| 43          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 2                      |
| <b>I.13</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                               |                                     |         |                            |                        |
| 44          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 6                      |
| 45          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 6                      |
| 46          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 6                      |
| 47          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 2                      |
| 48          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 5                      |
| 49          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 5                      |
| 50          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 5                      |

| No          | Program/ Kegiatan Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Satuan  | Rencana Kinerja Tahun 2021 |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                      |                                     |         | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja |
| 51          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 2                      |
| <b>I.14</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                                   |                                     |         |                            |                        |
| 52          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 5                      |
| 53          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 5                      |
| 54          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 5                      |
| 55          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 2                      |
| 56          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 18                     |
| 57          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 18                     |
| 58          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 18                     |
| 59          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | Jumlah dokumen                      | dokumen | Tenggarong                 | 2                      |

## 2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan dokumen perubahan rencana strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, amanat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. PK & Target Sasaran Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

| NO. | SASARAN                                                               | INDIKATOR KINERJA SASARAN                                              | SATUAN                    | Target |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
|     |                                                                       |                                                                        |                           | 2021   |
| (1) | (2)                                                                   | (3)                                                                    | (4)                       | (5)    |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                            | Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                                 | Nilai/Peringkat (absolut) | 82     |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                  | Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi | Nilai/Peringkat (absolut) | 1      |
| 3.  | Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah               | Persentase (%)            | 90     |

Selain perjanjian kinerja yang berdasarkan dari dokumen perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat perjanjian kinerja tambahan yang merupakan amanat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2021

| NO  | SASARAN                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                       | SATUAN | TARGET |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1) | (2)                                        | (3)                                                           | (4)    | (5)    |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda | Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti    | Jumlah | 7      |
|     |                                            | Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran | Persen | 100    |

| NO  | SASARAN                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                                                                             | SATUAN   | TARGET         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| (1) | (2)                                                                                                                             | (3)                                                                                                                                                                                                                 | (4)      | (5)            |
|     |                                                                                                                                 | Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) | Persen   | 100            |
|     |                                                                                                                                 | Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021                                                                                                                                                  | Persen   | 100            |
|     |                                                                                                                                 | Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021                                                                                                                                                                   | Persen   | 100            |
|     |                                                                                                                                 | Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah                                                                                                                                                                         | Predikat | Baik (B) 60-70 |
| 2   | Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah | Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf                                                                                               | Persen   | 100            |
| 3   | Menurunnya Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara                                                                      | Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)                                                                                       | Persen   | 100            |

### 2.5.1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan (Belanja Langsung) dengan anggaran murni sebesar **Rp. 30.739.332.331**, melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2021 menjadi **Rp. 34.143.723.515**

Tabel 9. Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran (APBD) Tahun 2021

| Program Kegiatan dan Sub Kegiatan                                             | Lokasi     | KINERJA                                                        |                |         | ANGGARAN              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                               |            | Indikator Kinerja                                              | Target Capaian | Satuan  | Murni                 | Perubahan             |
| 1                                                                             | 2          | 3                                                              | 4              | 5       | 6                     | 7                     |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>            |            |                                                                |                |         | <b>24.870.182.891</b> | <b>26.443.374.663</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       |            |                                                                |                |         | <b>799.999.800</b>    | <b>239.367.000</b>    |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Tenggarong | Jumlah dokumen                                                 | 9              | dokumen | 499.999.800           | 129.063.000           |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | Tenggarong | Jumlah dokumen                                                 | 4              | dokumen | 100.000.000           | 30.180.000            |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Tenggarong | Jumlah dokumen                                                 | 6              | dokumen | 200.000.000           | 80.124.000            |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 |            |                                                                |                |         | <b>16.610.307.349</b> | <b>17.693.610.591</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Tenggarong | Tersedianya Gaji dan Tunjangan                                 | 12             | bulan   | 16.301.447.549        | 17.424.513.591        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tenggarong | Jumlah dokumen                                                 | 5              | dokumen | 308.859.800           | 269.097.000           |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 |            |                                                                |                |         | <b>200.000.000</b>    | <b>115.325.000</b>    |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Tenggarong | Jumlah dokumen                                                 | 2              | dokumen | 200.000.000           | 115.325.000           |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              |            |                                                                |                |         | <b>417.749.700</b>    | <b>272.884.700</b>    |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | Tenggarong | Jumlah dokumen                                                 | 1              | dokumen | 69.999.800            | 42.227.800            |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Tenggarong | Jumlah ASN                                                     | 40             | orang   | 347.749.900           | 230.656.900           |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     |            |                                                                |                |         | <b>1.317.386.070</b>  | <b>1.556.928.210</b>  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Tenggarong | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan                       | 48             | Jenis   | 209.402.620           | 261.092.620           |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Tenggarong | Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disediakan | 7              | Jenis   | 202.607.200           | 305.987.200           |

| Program Kegiatan dan Sub Kegiatan                                       | Lokasi     | KINERJA                                                  |                |            | ANGGARAN             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |            | Indikator Kinerja                                        | Target Capaian | Satuan     | Murni                | Perubahan            |
| 1                                                                       | 2          | 3                                                        | 4              | 5          | 6                    | 7                    |
|                                                                         |            | Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan | 6210           | Kotak      |                      |                      |
|                                                                         |            | Jumlah bahan logistik                                    | 9              | Jenis      |                      |                      |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Tenggarong | Jumlah Cetak                                             | 1276           | Lembar     | 52.850.000           | 41.570.000           |
|                                                                         |            | Jumlah Penggandaan                                       | 50130          | Lembar     |                      |                      |
|                                                                         |            | Jumlah Cetak Kalender                                    | 174            | Buah       |                      |                      |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Tenggarong | Jumlah bacaan yang disediakan                            | 2493           | Eksemplar  | 50.547.500           | 200.389.640          |
|                                                                         |            | Jumlah Kontrak Advetorial                                | 2              | Advetorial |                      |                      |
| Penyediaan Bahan/Material                                               | Tenggarong | Jumlah Bahan Pendukung Pameran/Even                      | 0              | Jenis      | 86.780.000           | 0                    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Tenggarong | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi                   | 150            | Kali       | 524.498.750          | 524.498.750          |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Tenggarong | Jumlah layanan arsip file center                         | 5              | Unit       | 95.000.000           | 127.690.000          |
|                                                                         |            | Jumlah layanan arsip record center                       | 1              | Unit       |                      |                      |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Tenggarong | Jumlah aplikasi                                          | 1              | Aplikasi   | 95.700.000           | 95.700.000           |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |            |                                                          |                |            | <b>1.400.823.520</b> | <b>2.128.741.082</b> |
| Pengadaan Mebel                                                         | Tenggarong | Jumlah Mebeleur yang diadakan                            | 1              | Jenis      | 418.837.760          | 522.531.600          |
|                                                                         |            | Jumlah Interior Data Center                              | 2              | Paket      |                      |                      |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Tenggarong | Jumlah peralatan gedung kantor                           | 21             | Jenis      | 949.135.760          | 1.573.359.482        |

| Program Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                  | Lokasi     | KINERJA                                                     |                |        | ANGGARAN             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                    |            | Indikator Kinerja                                           | Target Capaian | Satuan | Murni                | Perubahan            |
| 1                                                                                                                  | 2          | 3                                                           | 4              | 5      | 6                    | 7                    |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Tenggarong | Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor                       | 1              | Unit   | 32.850.000           | 32.850.000           |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |            |                                                             |                |        | <b>2.272.313.550</b> | <b>2.153.107.880</b> |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Tenggarong | Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12             | bulan  | 1.521.900.000        | 1.418.223.920        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Tenggarong | Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS            | 12             | bulan  | 750.413.550          | 734.883.960          |
|                                                                                                                    |            | Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan                           | 12             | bulan  |                      |                      |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |            |                                                             |                |        | <b>1.851.602.902</b> | <b>2.283.410.200</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tenggarong | Jumlah kendaraan dinas roda dua                             | 15             | Unit   | 354.502.820          | 328.092820           |
|                                                                                                                    |            | Jumlah kendaraan dinas roda empat                           | 6              | Unit   |                      |                      |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Tenggarong | Jumlah kendaraan dinas roda dua dan empat                   | 25             | Unit   | 233.002.620          | 230.072.620          |
|                                                                                                                    |            | Jumlah kendaraan dinas roda empat                           | 3              | Unit   |                      |                      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Tenggarong | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                           | 39             | Kali   | 544.668.802          | 910.304.800          |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Tenggarong | Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor         | 132            | Kali   | 719.428.660          | 814.939.960          |

| Program Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                             | Lokasi     | KINERJA                                                           |                |          | ANGGARAN             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                               |            | Indikator Kinerja                                                 | Target Capaian | Satuan   | Murni                | Perubahan             |
| 1                                                                                             | 2          | 3                                                                 | 4              | 5        | 6                    | 7                     |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                      |            |                                                                   |                |          | <b>3.382.400.000</b> | <b>3.811.935.432</b>  |
| <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                   |            |                                                                   |                |          | <b>1.895.000.000</b> | <b>2.223.768.000,</b> |
| Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Tenggarong | Jumlah dokumen                                                    | 1              | Dokumen  | 270.000.000          | 420.000.000           |
| Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Tenggarong | Jumlah OPD                                                        | 58             | OPD      | 300.000.000          | 587.634.000           |
|                                                                                               |            | Jumlah Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah              | 1              | Aplikasi |                      |                       |
|                                                                                               |            | Jumlah dokumen                                                    | 1              | Dokumen  |                      |                       |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | Tenggarong | Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik                              | 2              | Kali     | 90.000.000           | 59.396.000            |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD                                                 | Tenggarong | Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 2              | Forum    | 45.000.000           | 45.000.000            |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         | Tenggarong | Jumlah pelaksanaan Musrenbang                                     | 2              | Kali     | 90.000.000           | 90.000.000            |
| Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                               | Tenggarong | Jumlah Dokumen                                                    | 18             | Dokumen  | 200.000.000          | 121.738.000           |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     | Tenggarong | Jumlah dokumen                                                    | 3              | Dokumen  | 900.000.000          | 900.000.000           |
| <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |            |                                                                   |                |          | <b>584.900.000</b>   | <b>828.163.932</b>    |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Tenggarong | Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)                          | 3              | Dokumen  | 302.500.000          | 281.450.000           |

| Program Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                          | Lokasi     | KINERJA                                         |                |         | ANGGARAN             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                            |            | Indikator Kinerja                               | Target Capaian | Satuan  | Murni                | Perubahan             |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3                                               | 4              | 5       | 6                    | 7                     |
| Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                                                  | Tenggarong | Jumlah Pendamping ketersediaan data (32 Urusan) | 32             | Urusan  | 180.000.000          | 459.873.500           |
|                                                                                                                            |            | Jumlah dokumen                                  | 1              | Dokumen |                      |                       |
| Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Tenggarong | Jumlah dokumen                                  | 1              | Dokumen | 102.400.000          | 86.840.432            |
| <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                          |            |                                                 |                |         | <b>902.500.000</b>   | <b>760.003.500</b>    |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                   | Tenggarong | Jumlah dokumen pengendalian                     | 8              | Dokumen | 202.500.000          | 128.248.000           |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                         | Tenggarong | Jumlah laporan monev                            | 4              | Dokumen | 700.000.000          | 631.755.500,          |
| <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                  |            |                                                 |                |         | <b>2.486.749.440</b> | <b>3.888.413.420</b>  |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                                  |            |                                                 |                |         | <b>1.036.750.000</b> | <b>1.033.430.800,</b> |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Tenggarong | Jumlah dokumen                                  | 13             | Dokumen | 115.000.000          | 91.668.000            |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Tenggarong | Jumlah dokumen                                  | 13             | Dokumen | 70.000.000           | 44.084.000            |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Tenggarong | Jumlah dokumen                                  | 1              | Dokumen | 250.000.000          | 244.602.900           |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Tenggarong | Jumlah dokumen                                  | 12             | Dokumen | 236.750.000          | 136.788.000           |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Tenggarong | Jumlah dokumen                                  | 12             | Dokumen | 115.000.000          | 97.490.000            |

| Program Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                   | Lokasi     | KINERJA           |                |         | ANGGARAN           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                                     |            | Indikator Kinerja | Target Capaian | Satuan  | Murni              | Perubahan            |
| 1                                                                                                                   | 2          | 3                 | 4              | 5       | 6                  | 7                    |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia         | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 2              | Dokumen | 250.000.000        | 418.797.900          |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                        |            |                   |                | Dokumen | <b>725.000.000</b> | <b>1.449.174.300</b> |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 6              | Dokumen | 67.500.000         | 101.366.900          |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 6              | Dokumen | 22.500.000         | 22.500.000           |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 6              | Dokumen | 200.000.000        | 146.945.000          |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 2              | Dokumen | 33.750.000         | 533.750.000          |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 5              | Dokumen | 90.000.000         | 67.482.000           |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 5              | Dokumen | 22.500.000         | 19.298.900           |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 5              | Dokumen | 255.000.000        | 189.412.500          |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                         | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 2              | Dokumen | 33.750.000         | 368.419.000          |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                                  |            |                   |                | Dokumen | <b>724.999.440</b> | <b>1.405.808.320</b> |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 5              | Dokumen | 45.000.000         | 45.000.000           |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                          | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 5              | Dokumen | 22.500.000         | 11.780.000           |

| Program Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                    | Lokasi     | KINERJA           |                |         | ANGGARAN       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
|                                                                                                                      |            | Indikator Kinerja | Target Capaian | Satuan  | Murni          | Perubahan      |
| 1                                                                                                                    | 2          | 3                 | 4              | 5       | 6              | 7              |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 5              | Dokumen | 249.999.620    | 149.901.000    |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 2              | Dokumen | 45.000.000     | 429.000.000    |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 18             | Dokumen | 45.000.000     | 24.908.000,    |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 18             | Dokumen | 22.500.000     | 16.500.000     |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 18             | Dokumen | 249.999.820    | 183.719.320    |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | Tenggarong | Jumlah dokumen    | 2              | Dokumen | 45.000.000     | 545.000.000    |
| Jumlah                                                                                                               |            |                   |                |         | 30.739.332.331 | 34.143.723.515 |

## 2.5.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

| Sasaran/IKU                                                                    | Program                                                            | Anggaran                 | % dari Total Anggaran |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda*(IKU 1)                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 26.443.374.663,00        | 77,45                 |
|                                                                                | <b>TOTAL ANGGARAN PER SASARAN</b>                                  | <b>26.443.374.663,00</b> | <b>77,45</b>          |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah *(IKU 2)                  | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | 3.811.935.432,00         | 11,16                 |
|                                                                                | <b>TOTAL ANGGARAN PER SASARAN</b>                                  | <b>3.811.935.432,00</b>  | <b>11,16</b>          |
| Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah *(IKU 3) | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3.888.413.420,00         | 11,39                 |
|                                                                                | <b>TOTAL ANGGARAN PER SASARAN</b>                                  | <b>3.888.413.420,00</b>  | <b>11,39</b>          |
|                                                                                | <b>TOTAL ANGGARAN TAHUN 2021</b>                                   | <b>34.143.723.515,00</b> | <b>100</b>            |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 10. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan 2020

| No | Komponen Yang di Nilai        | Bobot | Nilai 2019 | Nilai 2020 | Keterangan |
|----|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja           | 30%   | 27,43      | 27,88      | Meningkat  |
| 2. | Pengukuran Kinerja            | 25%   | 20,63      | 20,63      | -          |
| 3. | Pelaporan Kinerja             | 15%   | 13,30      | 13,56      | Meningkat  |
| 4. | Evaluasi Kinerja              | 10%   | 8,50       | 8,77       | Meningkat  |
| 5. | Capaian Kinerja               | 20%   | 14,38      | 14,38      | -          |
|    | Nilai Hasil Evaluasi          | 100%  | 84,22      | 85,21      | Meningkat  |
|    | Tingkat Akuntabilitas Kinerja |       | A          | A          | Meningkat  |

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi yang di keluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Bappeda kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dari tahun 2019. Berdasarkan hasil tersebut inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan rekomendasi/ tindak lanjut atas laporan evaluasi implementasi Sistem AKIP di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Tabel 11. Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                      | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target atau pengukuran capaian kinerja, belum di implementasikan dalam bentuk peringkat kinerja ASN dengan diumumkan secara periodik serta belum diberikan rewards atas pencapaian kinerja dalam bentuk langkah-langkah nyata | - Penguatan Sistem internal pengendalian dan evaluasi melalui pengukuran kinerja bulanan dan triwulanan berbasis teknologi dan informasi (Aplikasi)<br>- Dalam rangka pengukuran dan apresiasi terhadap capaian kinerja dilakukan Pemberian Reward dan Punishment. | 1. Evaluasi Kinerja Bulanan dan Triwulanan di laksanakan melalui Aplikasi E-Pantau<br>2. Rapat Evaluasi atas capaian kinerja triwulanan<br>3. Pendokumentasian dan pengarsipan hasil kinerja<br>4. Surat Keputusan Kinerja Baik, Cukup dan Kurang berdasarkan Perjanjian Kinerja<br>5. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan tugas dan Fungsi terutama pada ASN yang terlibat langsung dalam penguatan SAKIP Perangkat Daerah. |
| 2. | Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam Pengarahan dan Pengorganisasian kegiatan dalam bentuk internal meeting setiap bidang secara periodik yang disertai dengan notulen hasil pembahasan                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan dokumen perubahan rencana strategis telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan evaluasi capaian kinerja Rencana Strategis periode sebelumnya, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun realisasi kinerja utama Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

| NO | SASARAN                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                      | REALISASI |       | TAHUN 2021 |           |           | Kriteria Penilaian | % Peningkatan /Penurunan Tahun 2020 | TARGET AKHIR RENSTRA (2021) | % CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (2021) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                        | 2019      | 2020  | TARGET     | REALISASI | % CAPAIAN |                    |                                     |                             |                                                |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                            | Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                                 | 79.61     | 84.22 | 82         | 85.21     | 100       | Sangat Tinggi      | 100                                 | 82                          | 100                                            |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                  | Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi | 1         | 1     | 1          | 1         | 100       | Sangat Tinggi      | 100                                 | 1                           | 100                                            |
| 3. | Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah               | 90.49     | 87.82 | 90         | 87,20     | 96,89     | Sangat Tinggi      | (0,62)                              | 90                          | 96,89                                          |

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja Organisasi per sasaran

#### 3.3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA diukur dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA yang dinilai dari hasil Laporan Hasil Evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah oleh inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



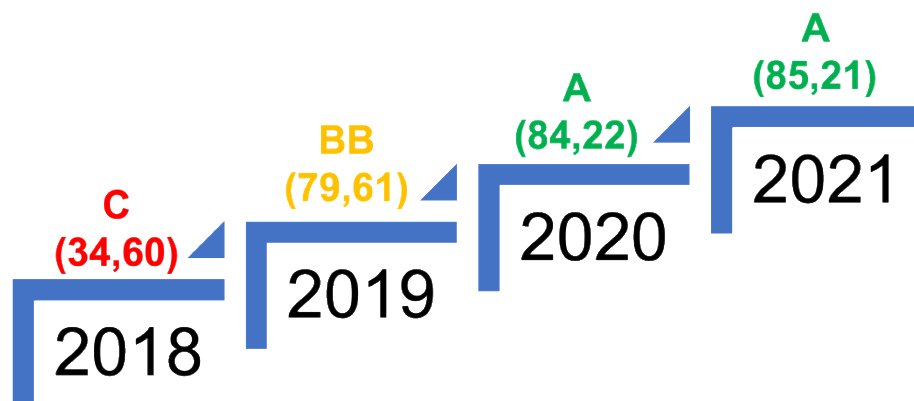
| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1            |                                                 |        |               |         |           |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-----------|---------------|
| SASARAN                                    | INDIKATOR                                       | TARGET |               | CAPAIAN | % CAPAIAN |               |
|                                            |                                                 | 2021   | AKHIR RENSTRA |         | 2021      | AKHIR RENSTRA |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda | Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 82     | 82            | 85,21   | 100       | 100           |

Sesuai dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2021 yang merupakan penilaian capaian akuntabilitas tahun 2020. Capaian kinerja akuntabilitas Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat dengan peningkatan skor sebesar 85,21 di tahun 2021, meningkat 0.99 poin dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan skor sebesar 84,22. Dengan skor tersebut maka peringkat penilaian akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam predikat “A” dengan interpretasi Memuaskan

Capaian yang diraih Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah proses perbaikan yang terus menerus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja yang merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Kualitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan pendekatan melalui perbaikan standar belanja berbasis program yang berprinsip pada efisiensi, bukan pada serapan anggaran. Selain itu dengan perbaikan-perbaikan dalam kualitas perencanaan yang merupakan bagian “hulu” dalam proses SAKIP terus di perkuat dengan fokus pada perbaikan dan penguatan penyusunan indikator dan target kinerja hal ini diimplementasikan dalam bentuk keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja. Selain

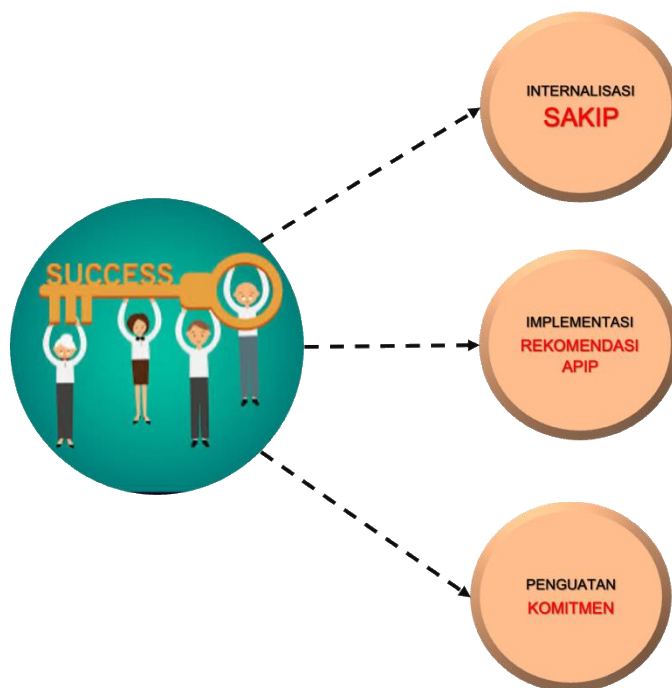
hal prinsip yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerja, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara juga terus berupaya untuk melakukan inovasi dalam penerapan manajemen kinerja internal, agar mampu mengukur ketercapaian tujuan organisasi. Selama kurun waktu 5 Tahun, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkomitmen dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah sebagai bagian dari tanggung jawab kepada Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan. Capaian sasaran ini terus meningkat dari tahun 2018-2021 (tahun 2017 tidak ada penilaian terhadap pelaksanaan kinerja Bappeda oleh APIP), dimana di Tahun 2018 kondisi akuntabilitas kinerja Bappeda termasuk dalam C, dengan intepetasi penilaian adalah kurang dimana sistem manajemen kinerja banyak perlu perbaikan, berangkat dari hasil evaluasi tersebut maka sejalan dengan perubahan rencana strategis perangkat daerah, maka perbaikan-perbaikan terus dilakukan mulai dari perbaikan indikator mulai dari aspek sasaran strategis sampai ke hal paling mendasar di indikator capaian kegiatan/sub kegiatan, dan terus meningkatkan manajemen kinerja berbasis hasil (result oriented). Kondisi inilah yang mendorong capaian Akuntabilitas Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sampai pada akhir periode pelaksanaan Rencana Strategis di tahun 2021 mendapat predikat A.

Gambar 7. Perbandingan Capaian Akuntabilitas Kinerja Bappeda tahun 2018-2021



Sebagai bagian evaluasi dan proses perbaikan kedepannya, perlu juga untuk diuraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat Pencapaian indikator sasaran tersebut diatas. Adapun faktor ataupun kunci kesuksesan dalam mencapai target kinerja dari sasaran 1 adalah sebagai berikut.

Gambar 8. Faktor Pendukung Capaian IKU 1



Faktor pendukung capaian dari sasaran 1 terdiri dari 3 aspek yaitu Internalisasi SAKIP, Implementasi Rekomendasi APIP, serta Penguatan Komitmen. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Internalisasi SAKIP

Merupakan bagian dari proses dalam penguatan dan sinergi pelaksanaan SAKIP di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, internalisasi dilakukan dengan selalu memberikan informasi dan pemahaman kepada seluruh ASN dilingkungan BAPPEDA terkait pentingnya SAKIP melalui Rapat-Rapat Internal, proses penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan tugas fungsi Bappeda. Internalisasi SAKIP dilakukan melalui Langkah konkrit seperti Implementasi Keselarasan antar dokumen perencanaan, implementasi, perencanaan kinerja berorientasi hasil.

2. Implementasi Rekomendasi APIP

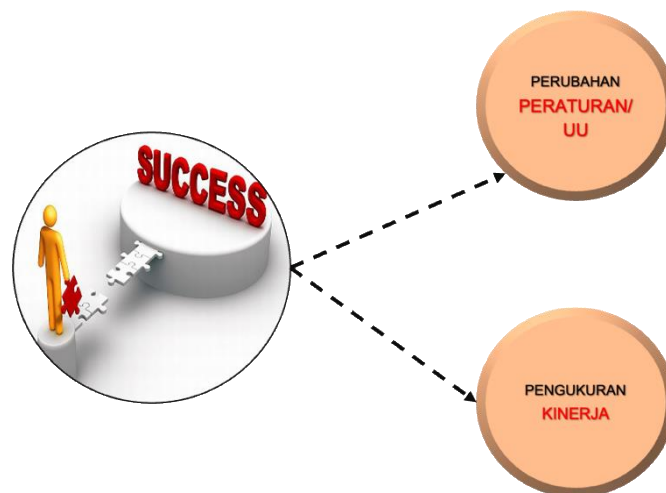
APIP / Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian penting dalam pencapaian Kinerja di BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Perangkat Daerah yang melakukan review terhadap pelaksanaan SAKIP di Perangkat daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan bimbingan dan

pembinaan yang di tuangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memberikan umpan balik (Feedback) terhadap perbaikan dalam pelaksanaan SAKIP di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Langkah konkrit berupa peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen LkjlP serta Peningkatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

### 3. Penguatan Komitmen

Penguatan komitmen merupakan salah satu faktor pendukung yang memberikan sumbangsih dalam pencapaian SAKIP Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, penguatan komitmen dilakukan dengan melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berjenjang dari Level Pimpinan tertinggi di Perangkat Daerah sampai dengan seluruh ASN di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Perjanjian Kinerja di evaluasi setiap akhir tahun capaiannya. Penguatan komitmen, mulai dari kepala daerah beserta jajaran pimpinan perangkat daerah merupakan hal yang sangat elementer dalam keberhasilan implementasi SAKIP. Penguatan komitmen memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan SAKIP tidak hanya berupa penyusunan berbagai macam dokumen semata, serta bukan hanya menjadi tanggung jawab pejabat yang menangani perencanaan dan pelaporan, melainkan dibutuhkan pula dukungan dan keterlibatan aktif dari pimpinan namun seluruh ASN untuk ikut serta dalam proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai dengan proses evaluasi. Selain faktor pendukung disajikan pula faktor-faktor penghambat capaian kinerja sasaran strategis 2.

Gambar 9. Faktor Penghambat Capaian IKU 1



Faktor penghambat capaian dari sasaran 1 terdiri dari 2 aspek besar yaitu Perubahan Peraturan/Undang-Undang dan Pengukuran Kinerja. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Perubahan Peraturan/ UU

Adanya perubahan peraturan seperti Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 terkait nomenklatur program kegiatan dan Sub Kegiatan, memberikan dampak yang cukup signifikan pada pemetaan dan Cascading program dan kegiatan beserta indikator yang telah disusun sebelumnya pada dokumen perencanaan. Diperlukan pemetaan dan cascading ulang yang memberikan potensi kekeliruan dalam penetapan dan penyusunan dokumen perencanaan, dimana dokumen perencanaan mempunyai bobot yang cukup tinggi dalam penilaian SAKIP.

#### 2. Pengukuran Kinerja

Proses Pengukuran kinerja masih belum optimal dilakukan, seperti Pengukuran kinerja berjenjang, Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, serta Pemanfaatan pengukuran kinerja. Dalam hal pengukuran kinerja individu masih ditemukan kendala seperti belum taatnya masing-masing untuk melaporkan kinerja masing-masing secara periodik, Kondisi ini tentunya menjadi pendorong untuk terus dilakukan peningkatan komitmen dari seluruh ASN dan dilakukan penilaian dan perbaikan pelaksanaan program di Lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka peningkatan Kualitas SAKIP.

Dalam rangka mengatasi faktor penghambat yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka diperlukan Alternatif/Solusi pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan ke depannya sebagai berikut.

| ALTERNATIF SOLUSI DAN TINDAK LANJUT FAKTOR PENGHAMBAT                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. Perubahan Peraturan/UU                                                                                                                                                           | 2. Pengukuran Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | <p>Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Pemetaan dan Cascading Program dan Kegiatan serta pengendalian dan evaluasi triwulanan di internal Perangkat Daerah</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Komitmen pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan Evaluasi Berkala Secara periodik.</li> <li>2. Evaluasi atas hasil capaian kinerja dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran</li> </ol> |

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA, sebagai berikut:

| No | Program                                                                            | Kegiatan                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                       | Keterangan                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | Kegiatan Rutin/Generik yang dilaksanakan tahunan, mensupport seluruh kegiatan kesekretariatan/Internal Bappeda serta mendukung capaian seluruh IKU |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                      |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Kegiatan Rutin/Generik yang dilaksanakan tahunan, mensupport seluruh kegiatan kesekretariatan/Internal Bappeda                                     |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>             | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Kegiatan Rutin/Generik yang dilaksanakan tahunan, mensupport seluruh kegiatan kesekretariatan/Internal Bappeda                                     |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Kegiatan Rutin/Generik yang dilaksanakan tahunan, mensupport seluruh kegiatan kesekretariatan/Internal Bappeda                                     |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kegiatan Rutin/Generik yang dilaksanakan tahunan, mensupport seluruh kegiatan kesekretariatan/Internal Bappeda                                     |
|    |                                                                                    |                                                                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |                                                                                                                                                    |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                       | Keterangan |
|----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |         |          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |            |
|    |         |          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |            |

### 3.3.2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, koordinator kegiatan pembangunan, think-tank, dan administrator. Sasaran strategis meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan, mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah serta mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.



| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2                      |                                                                        |        |               |         |           |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-----------|---------------|
| SASARAN                                              | INDIKATOR                                                              | TARGET |               | CAPAIAN | % CAPAIAN |               |
|                                                      |                                                                        | 2021   | AKHIR RENSTRA |         | 2021      | AKHIR RENSTRA |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi | 1      | 1             | 100     | 100       | 100           |

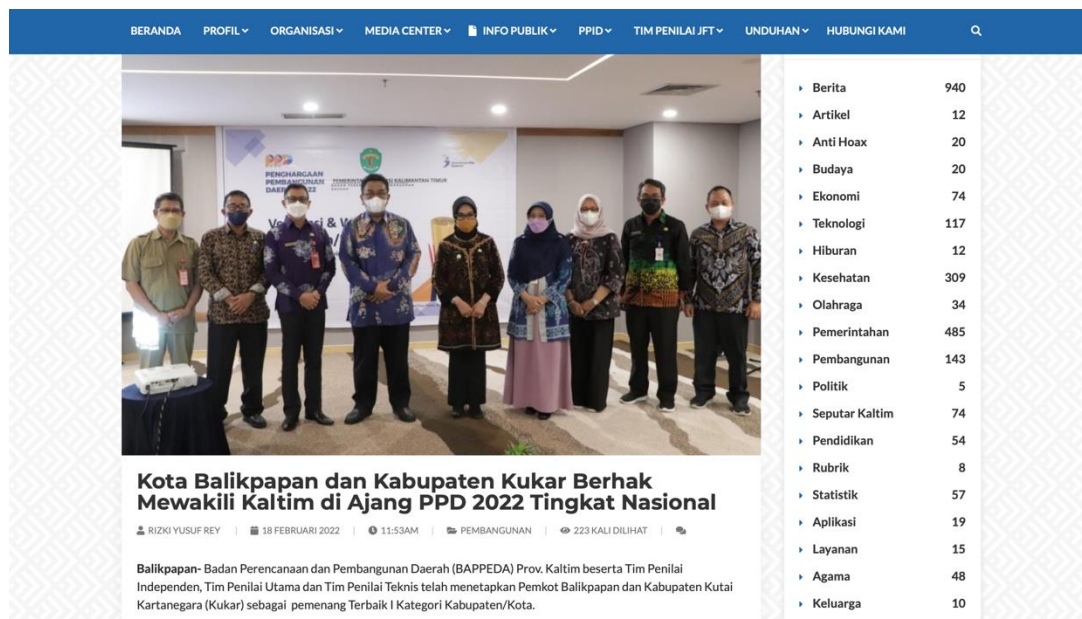
Implementasi dalam rangka pencapaian dari target sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah di wujudkan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang berperan sebagai koordinator sekaligus leading sektor urusan perencanaan melalui beberapa hal berikut:

1. Menyiapkan dokumen RKPD dengan kualitas yang baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.
3. Menciptakan dan mengembangkan inovasi yang bermutu dalam bidang perencanaan di daerah.

4. Mewujudkan konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dengan permasalahan/isu strategis, terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis.
5. Berhasil mewujudkan kebijakan pembangunan daerah RKPD yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
6. Assistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dalam rangka pencapaian target makro daerah, pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sukses pencapaian sasaran strategis ini tergambar dengan di raihnya anugerah perencanaan pembangunan daerah (PPD) ***dimana 3 tahun berturut-turut (Hatrick) sejak tahun 2019,2020 dan 2021*** Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh peringkat pertama untuk Kategori Kabupaten dalam penerima Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah dan selama 3 tahun berturut tersebut pula, Kabupaten Kutai Kartanegara mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk kompetisi yang sama di tingkat Nasional untuk Kategori Kabupaten.

Gambar 10. Headline Kutai Kartanegara Raih Penghargaan PPD



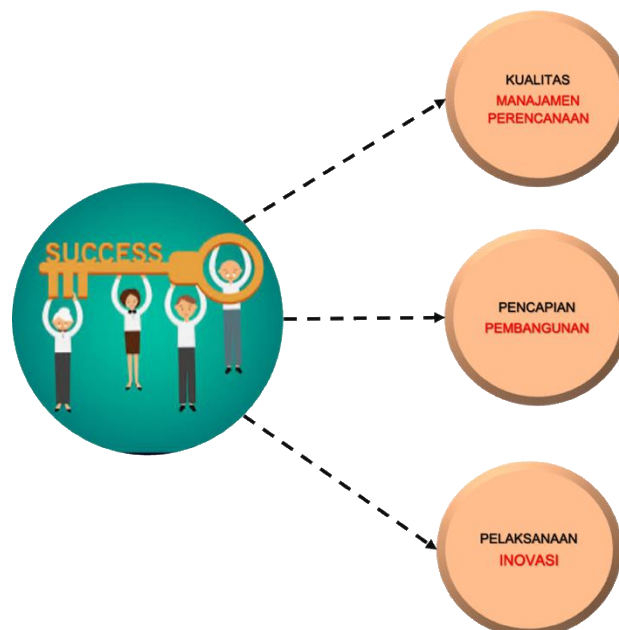
Sumber: <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/>

Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan 2018, capaian dari tahun 2019 sampai dengan 2021 merupakan capaian tertinggi dalam hal indikator sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Capaian ini merupakan bentuk komitmen dan perbaikan yang terus dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan perbaikan-perbaikan yang berpangkal pada meningkatnya capaian kinerja.

Gambar 11. Perbandingan Capaian Kinerja IKU-2



Adapun faktor ataupun kunci kesuksesan dalam mencapai target kinerja dari sasaran 2 adalah sebagai berikut.



Faktor pendukung capaian dari sasaran 2 terdiri dari 3 aspek yaitu Kualitas Manajemen Perencanaan, Pencapaian Pembangunan, serta Pelaksanaan Inovasi. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen Perencanaan

Manajemen perencanaan Pembangunan baik dari tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Dalam hal perencanaan, di dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan sudah sejalan, dimana sudah sesuai dengan visi dan misi serta kebijakan yang tertuang dalam RPJMD. Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada dokumen perencanaan tahunan sudah dapat dipetakan dengan baik. Serta dalam perencanaan selalu dilakukan penyelarasan dengan prioritas Nasional dengan tersedianya dukungan program prioritas daerah terhadap kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. Begitu pula pada posisi pengendalian dan evaluasi, dengan menggunakan aplikasi e-pantau proses pengendalian dan evaluasi bisa dilaksanakan dengan lebih optimal, sehingga proses perencanaan sampai evaluasi dapat berjalan dengan sinergis.

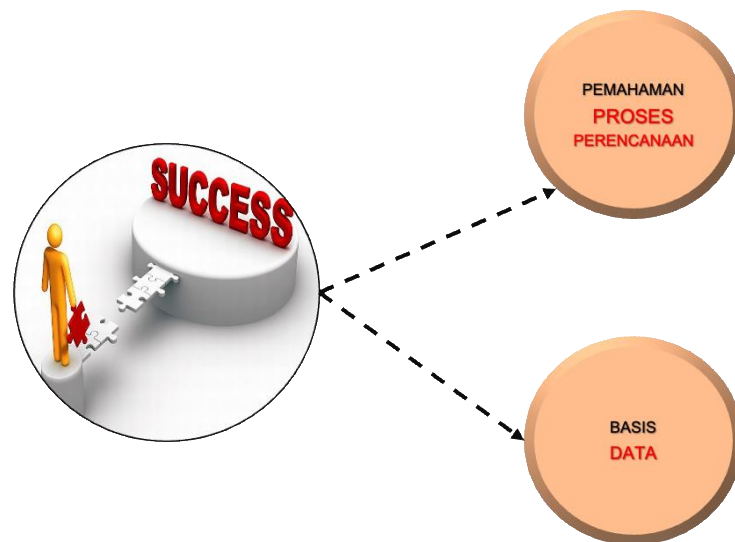
2. Pencapaian Pembangunan

Pencapaian Pembangunan daerah yang tergambar dari capaian makro daerah memberikan indikasi bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah memberikan dampak / outcome yang signifikan. Perencanaan yang baik yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang tepat yang di turunkan dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran akan memberikan efek pada target-target pencapaian penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi permasalahan daerah. Perencanaan yang baik diharapkan dapat menyentuh pokok-pokok permasalahan yang menjadi penghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung capaian-capaian indikator makro Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup menggembirakan dengan adanya indikasi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

### 3. Inovasi

Pelaksanaan inovasi di zaman serba digital menjadi suatu hal yang wajib. Terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung sepanjang tahun 2021. Bappeda dan seluruh Perangkat daerah di kabupaten Kutai Kartanegara terus melakukan inovasi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik. Bappeda sebagai perangkat daerah yang mempunyai wewenang pada urusan pendukung perencanaan terus responsif dalam rangka menghadapi industry 4.0 dan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka melayani masyarakat. Inovasi yang telah dilakukan Bappeda seperti pembuatan Aplikasi Satu Data “ BECIK” dan E-pantau memberikan dampak dalam proses kemudahan dan ketepatan mencari data dan evaluasi, hal ini tentu menjadi pendorong dalam rangka melaksanakan perencanaan yang lebih baik.

Adapun faktor penghambat pencapaian target sasaran strategis 2 ini, terdiri dari Pemahaman tentang perencanaan dan ketersediaan Basis Data yang akurat.



#### 1. Pemahaman Proses Perencanaan

Pemahaman OPD terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan yang masih rendah ditambah dengan terbitnya peraturan-peraturan terkait perencanaan pembangunan daerah, cukup memberikan dampak dalam proses perbaikan perencanaan di daerah. Proses asistensi dan pemahaman ulang terkait peraturan-peraturan tersebut tentunya memakan proses dan waktu. Selain itu Perangkat Daerah masih lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan yang bersifat administratif daripada pekerjaan yang bersifat substansial seperti proses penyusunan perencanaan.

## 2. Basis Data

Dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan yang berorientasi pada pembangunan di wilayahnya tentunya diperlukan data-data yang up to date, valid dan terukur yang dijadikan sebagai indikator pembangunan. Permasalahan yang terjadi selama ini bahwa penggunaan data yang update dan valid dalam rangka proses pembangunan masih sangat terbatas, selain itu koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada perangkat Daerah masih kurang, sehingga data-data yang seharusnya saling berhubungan menjadi terpisah dan sulit untuk diakses.

Dalam rangka mengatasi faktor penghambat yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka diperlukan Alternatif/Solusi pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan ke depannya.

| ALTERNATIF SOLUSI DAN TINDAK LANJUT FAKTOR PENGHAMBAT                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. Pemahaman Proses Perencanaan                                                                                                               | 2. Basis Data                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | Penguatan literasi perencanaan dengan Pemberian Bimbingan, supervisi dan konsultasi yang dilaksanakan secara berkala. Kepada Perangkat Daerah | Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Walidata Kab/Kota dan Produsen Data untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan SDI. |

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan daerah, sebagai berikut:

Tabel 13. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Ke-2

| No  | Program                                                                  | Kegiatan                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                  | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                  | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan RKPD/Renja, dari Proses Musrenbang tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Nasional. Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi ke Kabupaten, serta Peningkatan Konsistensi perencanaan Pembangunan Daerah. |
|     |                                                                          |                                                                                              | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                          |                                                                                              | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                          |                                                                                              | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                          |                                                                                              | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                          |                                                                                              | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                          |                                                                                              | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                          | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi data dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                          |                                                                                              | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                          |                                                                                              | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                          | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota      | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian terhadap capaian target-target pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan dokumen tahunan dan lima tahunan                                                                                                             |
|     |                                                                          |                                                                                              | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah            |                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.3.3. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran OPD

Sasaran perangkat daerah yang tergambar dari Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana SAKIP merupakan upaya dalam membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pencapaian indikator sasaran perangkat daerah dilakukan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat dengan Indikator Kinerja. Sehingga dapat

diketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan suatu manfaat bagi masyarakat (outcome)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Bappeda sebagai Perangkat daerah yang bertugas sebagai Leading Sektor Perencanaan Dengan menerapkan Pendekatan perencanaan Money Follow Program dengan Konsep “THIS” | Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah perencanaan sekaligus Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan terhadap Perencanaan di wilayahnya. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan Prioritas pembangunan daerah sehingga target capaian kinerja pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata dapat tercapai.



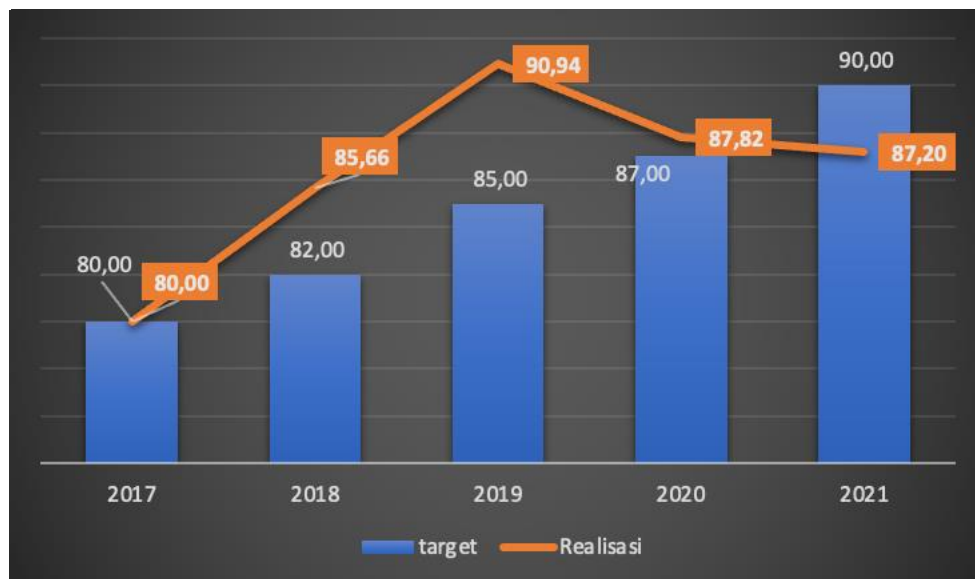
| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 3                                       |                                                          |        |               |         |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-----------|---------------|
| SASARAN                                                               | INDIKATOR                                                | TARGET |               | CAPAIAN | % CAPAIAN |               |
|                                                                       |                                                          | 2021   | AKHIR RENSTRA |         | 2021      | AKHIR RENSTRA |
| Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah | 90     | 90            | 87,20   | 96,89     | 96,89         |

Capaian IKU 3 Tahun 2021 mengalami penurunan, kondisi ini diakibatkan karena masih banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dijalankan secara maksimal oleh perangkat daerah mengingat kondisi pandemi covid-19 masih menunjukkan angka yang terus meningkat di level nasional dan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, adanya kebijakan Pemerintah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maka banyak aktifitas/ kegiatan masyarakat maupun sektor pemerintahan yang terhambat bahkan terhenti. Kondisi ini yang mendorong adanya penurunan pencapaian target ini.

Aspek Pencapaian target di dibawah bidang perencanaan ekonomi

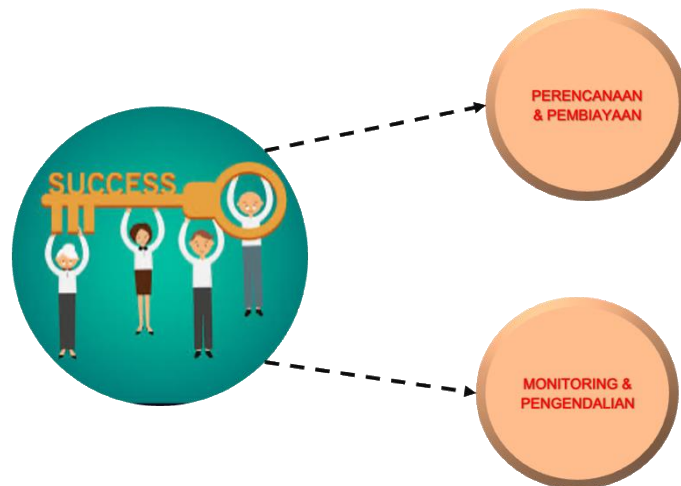
menyumbang penurunan capaian sasaran strategis ini, karena memang sektor ekonomi yang lebih banyak mengalami dampak di pandemi saat ini, selain itu kegiatan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah juga banyak terhambat karena adanya kebijakan PPKM tersebut.

Gambar 12. Perbandingan Capaian IKU 3 Periode 2017-2021



Berdasarkan data seri tahun 2017-2021 terlihat tren pencapaian sasaran strategis ini mengalami penurunan di dua tahun terakhir pelaksanaan rencana strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, tentunya pencapaian ini secara umum masih dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang telah dijelaskan diatas, tetapi hal ini perlu juga menjadi perhatian serius bagi Bappeda untuk tetap terus melakukan koordinasi dan Konsultasi serta asistensi dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan di era Adaptasi Kebiasaan Baru sehingga kedepannya penurunan capaian ini tidak terus berlangsung, kerana secara tidak langsung pencapaian Outcome dari target sasaran yang teruraikan dalam seluruh program dan kegiatan Perangkat Daerah tentunya akan berpengaruh pada

kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor pendukung Keberhasilan pencapaian target ini dilaksanakan melalui beberapa faktor-faktor sebagai berikut:



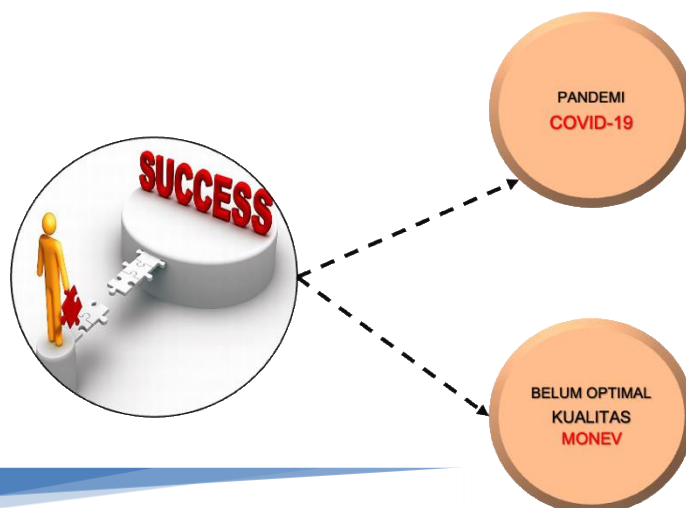
#### 1. Perencanaan dan Pembiayaan

Proses penyusunan perencanaan yang baik diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Bappeda sebagai think tank dan Leading dalam perencanaan dapat memberikan arahan perencanaan dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, sehingga seluruh perangkat daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian pembangunan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah/regional dan nasional. Dalam pelaksanaannya Bappeda melalui fungsi pengendalian dan evaluasinya mengarahkan perangkat daerah dalam mewujudkan komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra dan renja perangkat daerah masing-masing. Dengan demikian program-program yang dihasilkan dan dilaksanakan, dan dibiayai sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan serta dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran akhirnya dapat dicapai.

#### 2. Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Selain itu dilaksanakan juga pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan kemudian di input pada aplikasi e-pantau dan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. Kemudian Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terus secara aktif berperan dalam melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga menjadi salah satu faktor pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang ke-3.

Adapun faktor penghambat capaian kinerja sasaran strategis ini dapat disampaikan sebagai berikut:



## 1. Pandemi Covid-19

Seperti yang telah diuraikan diatas wabah Pandemi Covid-19 yang masih mewabah hingga saat ini menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan dalam pencapaian target-target pembangunan. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar pada pembangunan baik di level Nasional maupun Daerah. Selain berpengaruh pada pembangunan Nasional dan Daerah, wabah virus Covid-19 membuat Pemerintah harus mengoreksi sasaran-sasaran pembangunan yang berakibat pada koreksi juga pada target-target pencapaian sasaran strategis seluruh perangkat daerah. Dampak lainnya berkurangnya pembiayaan pembangunan akibat pengalihan anggaran yang digunakan untuk penanganan wabah (refocusing anggaran).

## 2. Belum Optimalnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi

Belum optimalnya proses monitoring dan pengendalian bidang-bidang perencanaan pembangunan cukup memberikan dampak pada pencapaian target indikator pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Masih belum optimalnya kualitas asistensi, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan bidang-bidang perencanaan di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara berdampak pada pencapaian target sasaran ini. Koordinasi dan Komunikasi dalam proses pengendalian pembangun yang dilakukan belum berjalan dengan optimal.

| ALTERNATIF SOLUSI DAN TINDAK LANJUT FAKTOR PENGHAMBAT                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. Pandemi Covid-19                                                                                                            | 2. Kualitas Monev                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Optimalisasi pelaksanaan dan penerapan new normal dan memaksimalkan protocol kesehatan dan pemanfaatan Teknologi dan Informasi | Penguatan Kompetensi Perencana, koordinasi dan konsultasi antara perangkat daerah dan Bappeda serta pengembangan dan penguatan system aplikasi pemantauan dan Evaluasi melalui aplikasi E-Pantau |

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Tabel 14. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Ke-3

| No | Program                                                                                       | Kegiatan                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                               | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | <b>PROGRAM<br/>KOORDINASI DAN<br/>SINKRONISASI<br/>PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN<br/>DAERAH</b> | <b>Koordinasi<br/>Perencanaan<br/>Bidang<br/>Pemerintahan dan<br/>Pembangunan<br/>Manusia</b>    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 1. Fasilitasi kegiatan koordinasi dan asistensi sub bidang perencanaan kepada seluruh OPD dibawah koordinasi masing-masing dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, Monitoring/Pengendalian serta evaluasi<br><br>2. Fasilitasi Kegiatan pendukung kebijakan Nasional dan Provinsi |
|    |                                                                                               |                                                                                                  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                               |                                                                                                  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                               |                                                                                                  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                               |                                                                                                  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                               |                                                                                                  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                               | <b>Koordinasi<br/>Perencanaan<br/>Bidang<br/>Perekonomian dan<br/>SDA (Sumber Daya<br/>Alam)</b> | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 1. Fasilitasi kegiatan koordinasi dan asistensi sub bidang perencanaan kepada seluruh OPD dibawah koordinasi masing-masing dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, Monitoring/Pengendalian serta evaluasi<br><br>2. Fasilitasi Kegiatan pendukung kebijakan Nasional dan Provinsi |
|    |                                                                                               |                                                                                                  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                               |                                                                                                  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                               |                                                                                                  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No | Program | Kegiatan                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                             | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         |                                                             | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         |                                                             | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         |                                                             | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 1. Fasilitasi kegiatan koordinasi dan asistensi sub bidang perencanaan kepada seluruh OPD dibawah koordinasi masing-masing dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, Monitoring/Pengendalian serta evaluasi<br><br>2. Fasilitasi Kegiatan pendukung kebijakan Nasional dan Provinsi |
|    |         |                                                             | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         |                                                             | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         |                                                             | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         |                                                             | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         |                                                             | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         |                                                             | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         |                                                             | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan                          | Keterangan |
|----|---------|----------|---------------------------------------|------------|
|    |         |          | Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |            |

### 3.4. Analisis Capaian Perjanjian Kinerja Tambahan

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang diperjanjikan antara kepala Bappeda dengan Bupati Kutai Kartanegara, selain perjanjian kinerja yang ditetapkan berdasarkan dokumen rencana strategis, ada pula perjanjian kinerja tambahan yang harus dilaksanakan di semua perangkat daerah. Adapun analisis terhadap capaian perjanjian kinerja tersebut diuraikan dibawah ini.

| NO  | SASARAN                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                                                                             | SATUAN   | TARGET         | CAPAIAN    | % CAPAIAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                                             | (3)                                                                                                                                                                                                                 | (4)      | (5)            |            |           |
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda                                                                                      | Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti                                                                                                                                                          | Jumlah   | 7              | 7          | 100       |
|     |                                                                                                                                 | Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran                                                                                                                                                       | Persen   | 100            | 100        | 100       |
|     |                                                                                                                                 | Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) | Persen   | 100            | 99,78      | 99,78     |
|     |                                                                                                                                 | Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021                                                                                                                                                  | Persen   | 100            | 100        | 100       |
|     |                                                                                                                                 | Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021                                                                                                                                                                   | Persen   | 100            | 100        | 100       |
|     |                                                                                                                                 | Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah                                                                                                                                                                         | Predikat | Baik (B) 60-70 | BB (74,43) | 100       |
| 2   | Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah | Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf                                                                                               | Persen   | 100            | 100        | 100       |

Selain indikator capaian penilaian LKJiP Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda terdapat tambahan indikator lainnya yang di perjanjikan pada tahun 2021 yaitu:

#### 1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah masing-masing dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Di tahun 2021 atas rekomendasi tersebut Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihak auditi telah merespon rekomendasi tersebut dalam bentuk tindak lanjut. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh Kepala Bappeda ke pihak BPK. Dalam hal tindak lanjut rekomendasi ini, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah di dampingi Inpektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga merupakan bagian dari auditi BPK dan sebagai tim pendamping dalam pemeriksaan, sekaligus tim pelaksana tindak lanjut hasil laporan (TLHP) yang secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Total jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2021 adalah sebanyak 7 temuan yang terdiri dari permasalahan penertiban penggunaan BMD yang digunakan pensiunan, mantan pejabat dan pegawai yang mutasi, pelaksanaan belanja modal dan Bappeda sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Semua hasil temuan tersebut sudah dilaporkan dalam bentuk laporan dan jawaban atas hasil rekomendasi BPK per tanggal 10 Desember Tahun 2020.

## **2. Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran**

Aset/barang milik daerah merupakan salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat/stakeholder. Namun disisi lain, walaupun memegang peranan penting, seringkali aset belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Selaras dengan hal tersebut di tahun 2021 Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), mulai dari identifikasi, penelusuran, sampai dengan rencana penghapusan BMD yang masuk dalam kategori rusak berat. Identifikasi aset-aset daerah yang telah dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mutakhir mengenai aset daerah yang dimiliki di

Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik. Selain itu dilakukan juga Pengembangan data base aset daerah yang bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang valid, dan hal yang paling penting adalah penguatan Pengawasan aset yang dilakukan sejak tahap perencanaan. Hasil dari identifikasi, inventarisasi aset dalam penelusuran Tahun 2018-2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 100 Persen hal ini dikarenakan bahwa Aset/Barang Milik Daerah Dalam Penelusuran sudah diidentifikasi dan diinventarisasikan.

### **3. Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP.**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi atas kebijakan pengadaan barang/jasa (PBJ), khususnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang lebih cepat, pasti, transparan dan akuntabel, maka Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan proses tersebut dengan input seluruh rencana umum pengadaan pada Aplikasi SiRUP. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara komitmen dalam pelaksanaan Keseluruhan tahapan PBJ yang dimulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaannya, dengan harapan PBJ yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi semakin mendorong terwujudnya value for money atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk persentase capaian ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP sebesar 99,78 % hal ini dikarenakan ada sub kegiatan pada tahun 2021 yang diinput pada aplikasi SiRUP melewati batas yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja 2021.

### **4. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021**

Sebagai salah satu prasyarat guna mencapai perangkat daerah yang sehat akuntabel serta bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menyadari pentingnya penerapan pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan Perangkat

Daerah  
sebagai

acuan bagi Pejabat Struktural dan seluruh ASN untuk menciptakan dan mengembangkan Budaya perangkat Daerah yang baik. Kepatuhan terhadap pelaporan bertujuan untuk mengurangi terjadinya peningkatan kekayaan pejabat perusahaan yang diperoleh dari tindakan korupsi, suap, kecurangan dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan. Dalam proses pengendalian internal, implementasi pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan ASNI(LHKPN & LHKASN) tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan bagi perangkat daerah dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari total pejabat struktural sebanyak 21 orang dan seluruh ASN non struktural sebanyak 113 orang telah secara tepat waktu melaporkan harta kekayaannya pada aplikasi LHKPN dan LHKASN.

#### **5. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.**

Sebagai bagian dari penerapan Peraturan Menpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa kualitas pengelolaan arsip menjadi indikator penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah. Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan akan menghadirkan manfaat yang besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik dan terpercaya pada setiap Lembaga dan Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten Kutai kartanegara telah melaksanakan perbaikan pengelolaan arsip mulai dari Pemilahan, Pengelompokkan, Pembuatan Daftar Arsip, Pembungkusan dan Penomoran Arsip, Penataan arsip dalam Boks, Pelabelan dan Penataan Boks dalam Roll Opack/Rak serta sampai pembangunan record center yang berguna untuk menyimpan dan mengakses arsip dengan cepat dan efisien serta akuntabel.

## **6. Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf.**

Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai koordinator dalam urusan perencanaan dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat menyajikan rumusan alternatif kebijakan yang berbasis data dan informasi yang bersifat strategis dalam mendukung perencanaan dan proses pembangunan. Ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat berdampak pada publik/masyarakat yang akan merasakan proses pembangunan serta mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Di tahun 2021 atas amanah perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan beberapa rumusan alternatif kebijakan dalam rangka perencanaan pembangunan.

### **3.5. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap penggunaan sumber daya baik berupa Sumber Daya Manusia, waktu, rentang kendali (birokrasi) maupun anggaran tanpa mengurangi hasil melainkan untuk meningkatkan capaian kinerja. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien serta menjadikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan:

#### **1. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan**

penerapan teknologi informasi dan komunikasi memang mutlak dalam institusi pemerintah sebagai alat bantu dalam meningkatkan produktivitas dan kemudahan dalam bekerja terutama di musim pandemi covid-19. Sebagai institusi perencanaan, Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, melalui pemanfaatan aplikasi dalam memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan seperti Aplikasi Geoportal, Aplikasi Becik serta

penggunaan aplikasi e-pantau dalam rangka memudahkan proses monitoring dan pengendalian yang digunakan sebagai bahan evaluasi perencanaan kedepan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh pada produktifitas dan capaian kinerja Bappeda selama musim pandemi covid-19, dimana rata-rata target indikator sasaran dapat tercapai.

## 2. Penggunaan Anggaran

Proses penerapan SAKIP di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan organisasi yang merujuk pada anggaran berbasis kinerja. Penghematan anggaran terjadi dengan memperhatikan kegiatan yang mendukung prioritas Daerah dan Nasional, mendukung pada pencapaian target-target Makro daerah dan kegiatan yang memfasilitasipencapaian sasaran-sasaran pada perangkat daerah. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja berbasis “target oriented”. Adapun gambaran mengenai efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 15. Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja

| No | Sasaran                                                               | Anggaran       | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | (%) Capaian Kinerja Sasaran | Efisiensi (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                            | 26,443,374,663 | 22,388,408,827     | 84.67                | 100                         | 15.33         |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                  | 3,811,935,432  | 2,547,009,994      | 66.82                | 100                         | 33.18         |
| 3  | Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah | 3,888,413,420  | 3,320,381,905      | 85.39                | 96.89                       | 14,61         |
|    |                                                                       | 34,143,723,515 | 28,255,800,726     | 82.76                |                             | 17,24         |

Berdasarkan tabel diatas implementasi SAKIP pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mengarahkan organisasi beserta pelaku di dalam untuk menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan pencapaian sasaran perangkat daerah. Implementasi SAKIP pada Bappeda telah mendorong terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja.

### 3.6. Realisasi Program, Kegiatan & Anggaran

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2021 pelaksanaan program Kegiatan serta sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pagu belanja langsung termasuk dengan belanja Generik Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 (Perubahan APBD) adalah sebesar **Rp 34,143,723,515** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar **Rp. 28,255,800,726** atau sebesar **82.76 %**. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Realisasi Kinerja Anggaran per Sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator                                                              | Kinerja |           |     | Anggaran       |                |       |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|----------------|----------------|-------|
|    |                                                      |                                                                        | Target  | Realisasi | %   | Target         | Realisasi      | %     |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA           | Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                                 | 82      | 85.02     | 100 | 26,443,374,663 | 22,388,408,827 | 84.67 |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi | 1       | 1         | 100 | 3,811,935,432  | 2,547,009,994  | 66.82 |

|                    |                                                                                   |                                                                      |    |       |       |                |                |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----------------|----------------|-------|
| 3                  | Meningkatnya<br>Persentase<br>Pencapaian<br>Indikator Sasaran<br>Perangkat Daerah | Persentase<br>Pencapaian<br>Indikator Sasaran<br>Perangkat<br>Daerah | 90 | 87.20 | 96.89 | 3,888,413,420  | 3,320,381,905  | 85.39 |
| Jumlah / Rata-rata |                                                                                   |                                                                      |    |       |       | 34,143,723,515 | 28,255,800,726 | 82,76 |

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Keuangan serta Efisiensi

| NO. | Sasaran/Program/Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                       | Target  |                   | Realisasi |                   | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|     |                                                                  |                                                         | Kinerja | Keuangan (RP)     | Kinerja   | Keuangan (RP)     |                     |                      |           |
|     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                       | Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA                  | 82      | 26,443,374,663    | 85.02     | 22,388,408,827    | 100                 | 84.67                | 15.33     |
|     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota        | Cakupan layanan administrasi perkantoran                | 100     |                   | 88.24     |                   | 88.24               |                      |           |
|     |                                                                  | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik | 82      |                   | 97        |                   | 100                 |                      |           |
|     |                                                                  | Rata-Rata Nilai Kinerja SKP                             | 85      |                   | 85.75     |                   | 100                 |                      |           |
|     |                                                                  | 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;            | 100     |                   | 100       |                   | 100                 |                      |           |
|     |                                                                  | 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;        | 100     |                   | 100       |                   | 100                 |                      |           |
|     |                                                                  | 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit                | 100     |                   | 100       |                   | 100                 |                      |           |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                         |         | 239,367,000.00    |           | 199,686,242.00    |                     | 83.42                | 16.58     |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen                                          | 9       | 129,063,000.00    | 9         | 104,185,040.00    | 100                 | 80.72                | 19.28     |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah dokumen                                          | 4       | 30,180,000.00     | 4         | 28,760,000.00     | 100                 | 95.29                | 4.71      |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah dokumen                                          | 7       | 80,124,000.00     | 6         | 66,741,202.00     | 85.71               | 83.30                | 16.70     |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                         |         | 17,693,610,591.00 |           | 14,188,770,374.00 |                     | 80.19                | 19.81     |

| NO. | Sasaran/Program/Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                              | Target  |                   | Realisasi |                   | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|     |                                                                               |                                                                | Kinerja | Keuangan (RP)     | Kinerja   | Keuangan (RP)     |                     |                      |           |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Tersedianya Gaji dan Tunjangan                                 | 12      | 17,424,513,591.00 | 12        | 13,940,917,774.00 | 100                 | 80.01                | 19.99     |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen                                                 | 5       | 269,097,000.00    | 5         | 247,852,600.00    | 100                 | 92.11                | 7.89      |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        |                                                                |         | 115,325,000.00    |           | 94,855,000.00     |                     | 82.25                | 17.75     |
|     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah dokumen                                                 | 2       | 115,325,000.00    | 2         | 94,855,000.00     | 100                 | 82.25                | 17.75     |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |                                                                |         | 272,884,700.00    |           | 201,549,367.00    |                     | 73.86                | 26.14     |
|     | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | Jumlah dokumen                                                 | 1       | 42,227,800.00     | 1         | 18,360,000.00     | 100                 | 43.48                | 56.52     |
|     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN                                                     | 40      | 230,656,900.00    | 32        | 183,189,367.00    | 80                  | 79.42                | 20.58     |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            |                                                                |         | 1,556,928,210.00  |           | 1,434,603,997.00  |                     | 92.14                | 7.86      |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan                       | 48      | 261,092,620.00    | 48        | 257,012,000.00    | 100                 | 98.44                | 1.56      |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Bahan Logistik                                          | 9       | 305,987,200.00    | 9         | 302,245,500.00    | 100                 | 98.78                | 1.22      |
|     |                                                                               | Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan       | 6210    |                   | 6210      |                   | 100                 |                      |           |
|     |                                                                               | Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disediakan | 7       |                   | 7         |                   | 100                 |                      |           |

| NO. | Sasaran/Program/Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                      | Target  |                  | Realisasi |                  | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|     |                                                                        |                                        | Kinerja | Keuangan (RP)    | Kinerja   | Keuangan (RP)    |                     |                      |           |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Cetak                           | 1276    | 41,570,000.00    | 1276      | 40,867,750.00    | 100                 | 98.31                | 1.69      |
|     |                                                                        | Jumlah penggandaan                     | 50130   |                  | 50130     |                  | 100                 |                      |           |
|     |                                                                        | Jumlah Cetak Kalender                  | 174     |                  | 174       |                  | 100                 |                      |           |
|     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah bacaan yang disediakan          | 2493    | 200,389,640.00   | 2493      | 198,836,320.00   | 100                 | 99.22                | 0.78      |
|     |                                                                        | Jumlah Kontrak Advetorial              | 2       |                  | 2         |                  | 100                 |                      |           |
|     | Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Bahan Pendukung Pameran/Even    | 0       | -                | 0         | -                | 0                   |                      |           |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                        | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 150     | 524,498,750.00   | 97        | 418,466,427.00   | 64.67               | 79.78                | 20.22     |
|     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah layanan arsip file center       | 5       | 127,690,000.00   | 5         | 127,046,000.00   | 100                 | 99.50                | 0.50      |
|     |                                                                        | Jumlah layanan arsip record center     | 1       |                  | 1         |                  | 100                 |                      |           |
|     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Aplikasi                        | 1       | 95,700,000.00    | 1         | 90,130,000.00    | 100                 | 94.18                | 5.82      |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                                        |         | 2,128,741,082.00 |           | 2,058,655,340.00 |                     | 96.71                | 3.29      |
|     | Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Mebeleur yang diadakan          | 1       | 522,531,600.00   | 1         | 511,601,340.00   | 100                 | 97.91                | 2.09      |
|     |                                                                        | Jumlah Interior data center            | 2       |                  | 2         |                  | 100                 |                      |           |

| NO. | Sasaran/Program/Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                           | Target  |                  | Realisasi |                  | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|     |                                                                                                                    |                                                             | Kinerja | Keuangan (RP)    | Kinerja   | Keuangan (RP)    |                     |                      |           |
|     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah peralatan gedung kantor                              | 21      | 1,573,359,482.00 | 21        | 1,547,054,000.00 | 100                 | 98.33                | 1.67      |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor                       | 1       | 32,850,000.00    | 0         | -                | 0                   | -                    | 0         |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                                             |         | 2,153,107,880.00 |           | 2,029,430,874.00 |                     | 94.26                | 5.74      |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12      | 1,418,223,920.00 | 12        | 1,325,437,155.00 | 100                 | 93.46                | 6.54      |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS            | 12      | 734,883,960.00   | 12        | 703,993,719.00   | 100                 | 95.80                | 4.20      |
|     |                                                                                                                    | Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                    | 12      |                  | 12        |                  | 100                 |                      |           |
|     | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                |                                                             |         | 2,283,410,200.00 |           | 2,180,857,633.00 |                     | 95.51                | 4.49      |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2                               | 15      | 328,092,820.00   | 15        | 278,530,741.00   | 100                 | 84.89                | 15.11     |
|     |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4                               | 6       |                  | 6         |                  | 100                 |                      |           |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2                               | 25      | 230,072,620.00   | 25        | 188,108,023.00   | 100                 | 81.76                | 18.24     |
|     |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4                               | 3       |                  | 3         |                  | 100                 |                      |           |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                           | 39      | 910,304,800.00   | 39        | 905,186,769.00   | 100                 | 99.44                | 0.56      |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor         | 132     | 814,939,960.00   | 132       | 809,032,100.00   | 100                 | 99.28                | 0.72      |

| NO. | Sasaran/Program/Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                      | Target  |                  | Realisasi |                  | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|     |                                                                                               |                                                                        | Kinerja | Keuangan (RP)    | Kinerja   | Keuangan (RP)    |                     |                      |           |
|     | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                                          | Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi | 1       | 3,811,935,432.00 | 1         | 2,547,009,994.00 | 100                 | 66.82                | 33.18     |
|     | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                             | 1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD; (persen)              | 100     |                  | 100       |                  | 100                 |                      |           |
|     |                                                                                               | 2) Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD                       | 99      |                  | 100       |                  | 100                 |                      |           |
|     | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          |                                                                        |         | 2,223,768,000.00 |           | 1,622,678,254.00 |                     | 72.97                | 27.03     |
|     | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Jumlah Dokumen                                                         | 1       | 420,000,000.00   | 1         | 241,742,150.00   | 100                 | 57.56                | 42.44     |
|     | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah OPD                                                             | 58      | 587,634,000.00   | 58        | 474,369,464.00   | 100                 | 80.73                | 19.27     |
|     |                                                                                               | Jumlah Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah                   | 1       |                  | 1         |                  | 100                 |                      |           |
|     |                                                                                               | Jumlah Dokumen                                                         | 1       |                  | 1         |                  | 100                 |                      |           |
|     | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik                                   | 2       | 59,396,000.00    | 2         | 42,182,000.00    | 100                 | 71.02                | 92.90     |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD                                                 | Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah      | 2       | 45,000,000.00    | 2         | 15,300,000.00    | 100                 | 34.00                | 66.00     |
|     | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah pelaksanaan Musrenbang                                          | 2       | 90,000,000.00    | 2         | 61,509,000.00    | 100                 | 68.34                | 31.66     |

| NO. | Sasaran/Program/Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                            | Target  |                | Realisasi |                | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|-----------|
|     |                                                                                           |                                                                              | Kinerja | Keuangan (RP)  | Kinerja   | Keuangan (RP)  |                     |                      |           |
|     | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                           | Jumlah Dokumen                                                               | 18      | 121,738,000.00 | 18        | 52,020,000.00  | 100                 | 42.73                | 73.99     |
|     | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD,RKPD dan Perubahan RKPD) | 3       | 900,000,000.00 | 3         | 735,555,640.00 | 100                 | 81.73                | 18.27     |
|     | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     |                                                                              |         | 828,163,932.00 |           | 517,920,700.00 |                     | 62.54                | 37.46     |
|     | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)                                     | 3       | 281,450,000.00 | 3         | 129,605,000.00 | 100                 | 46.05                | 53.95     |
|     | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                 | Jumlah Pendampingan ketersediaan data (32 Urusan)                            | 32      | 459,873,500.00 | 32        | 339,278,668.00 | 100                 | 73.78                | 26.22     |
|     |                                                                                           | Jumlah dokumen                                                               | 1       |                | 1         |                | 100                 |                      |           |
|     | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah dokumen                                                               | 1       | 86,840,432.00  | 1         | 49,037,032.00  | 100                 | 56.47                | 43.53     |
|     | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                |                                                                              |         | 760,003,500.00 |           | 406,411,040.00 |                     | 53.47                | 46.53     |
|     | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen pengendalian                                                  | 8       | 128,248,000.00 | 8         | 17,520,000.00  | 100                 | 13.66                | 86.34     |

| NO. | Sasaran/Program/Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                     | Target  |                  | Realisasi |                  | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                       | Kinerja | Keuangan (RP)    | Kinerja   | Keuangan (RP)    |                     |                      |           |
|     | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah Laporan Monev                                                                                                  | 4       | 631,755,500.00   | 4         | 388,891,040.00   | 100                 | 61.56                | 38.44     |
|     | Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah                                               | Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah                                                              | 90      | 3,888,413,420.00 | 87.2      | 3,320,381,905.00 | 96.89               | 85.39                | 14.61     |
|     | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                  | Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | 93      |                  | 89.19     |                  | 95.90               |                      |           |
|     | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  |                                                                                                                       |         | 1,033,430,800.00 |           | 890,449,289.00   |                     | 86.16                | 13.84     |
|     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah dokumen                                                                                                        | 13      | 91,668,000.00    | 13        | 85,223,652.00    | 100                 | 92.97                | 7.03      |
|     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen                                                                                                        | 13      | 44,084,000.00    | 13        | 35,011,171.00    | 100                 | 79.42                | 20.58     |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah dokumen                                                                                                        | 1       | 244,602,900.00   | 1         | 244,511,900.00   | 100                 | 99.96                | 0.04      |
|     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | Jumlah dokumen                                                                                                        | 12      | 136,788,000.00   | 12        | 84,355,380.00    | 100                 | 61.67                | 38.33     |

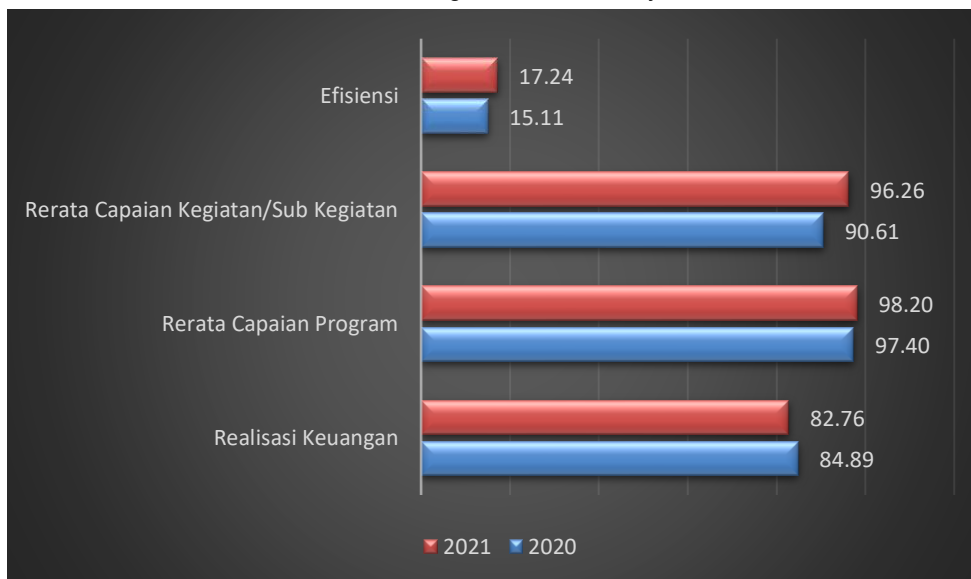
| NO. | Sasaran/Program/Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                              | Target  |                  | Realisasi |                  | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                | Kinerja | Keuangan (RP)    | Kinerja   | Keuangan (RP)    |                     |                      |           |
|     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen                                                                                                 | 12      | 97,490,000.00    | 12        | 43,927,600.00    | 100                 | 45.06                | 55.02     |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah dokumen                                                                                                 | 2       | 418,797,900.00   | 2         | 397,419,586.00   | 100                 | 94.90                | 5.10      |
|     | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                         | Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya | 97      |                  | 91.01     |                  | 93.82               |                      |           |
|     | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      |                                                                                                                |         | 1,449,174,300.00 |           | 1,201,975,282.00 |                     | 82.94                | 17.06     |
|     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah dokumen                                                                                                 | 6       | 101,366,900.00   | 6         | 71,436,000.00    | 100                 | 70.47                | 29.53     |
|     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Jumlah dokumen                                                                                                 | 6       | 22,500,000.00    | 6         | 22,500,000.00    | 100                 | 100.00               | 0.00      |
|     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | Jumlah dokumen                                                                                                 | 6       | 146,945,000.00   | 6         | 127,833,000.00   | 100                 | 86.99                | 13.01     |

| NO. | Sasaran/Program/Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                | Target  |                  | Realisasi |                  | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|     |                                                                                                            |                                                                                                                                  | Kinerja | Keuangan (RP)    | Kinerja   | Keuangan (RP)    |                     |                      |           |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian       | Jumlah dokumen                                                                                                                   | 2       | 533,750,000.00   | 2         | 484,094,276.00   | 100                 | 90.70                | 9.30      |
|     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah dokumen                                                                                                                   | 5       | 67,482,000.00    | 5         | 53,381,100.00    | 100                 | 79.10                | 20.90     |
|     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | Jumlah dokumen                                                                                                                   | 5       | 19,298,900.00    | 5         | 11,419,500.00    | 100                 | 59.17                | 40.83     |
|     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen                                                                                                                   | 5       | 189,412,500.00   | 5         | 101,205,406.00   | 100                 | 53.43                | 46.57     |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                | Jumlah dokumen                                                                                                                   | 2       | 368,419,000.00   | 2         | 330,106,000.00   | 100                 | 89.60                | 10.40     |
|     | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah | 88      |                  | 89.57     |                  | 100                 |                      |           |
|     | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                |                                                                                                                                  |         | 1,405,808,320.00 |           | 1,227,957,334.00 |                     | 87.35                | 12.65     |
|     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  | Jumlah dokumen                                                                                                                   | 5       | 45,000,000.00    | 5         | 28,660,000.00    | 100                 | 63.69                | 36.31     |
|     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                 | Jumlah dokumen                                                                                                                   | 5       | 11,780,000.00    | 5         | 11,620,000.00    | 100                 | 98.64                | 1.36      |

| NO. | Sasaran/Program/Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja | Target  |                          | Realisasi |                          | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Keuangan | Efisiensi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|     |                                                                                                                      |                   | Kinerja | Keuangan (RP)            | Kinerja   | Keuangan (RP)            |                     |                      |           |
|     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah dokumen    | 5       | 149,901,000.00           | 5         | 99,389,000.00            | 100                 | 66.30                | 33.70     |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah dokumen    | 2       | 429,000,000.00           | 2         | 406,160,000.00           | 100                 | 94.68                | 5.32      |
|     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah dokumen    | 18      | 24,908,000.00            | 18        | 20,688,000.00            | 100                 | 83.06                | 16.94     |
|     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah dokumen    | 18      | 16,500,000.00            | 18        | 13,450,000.00            | 100                 | 81.52                | 18.48     |
|     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Jumlah dokumen    | 18      | 183,719,320.00           | 18        | 163,619,084.00           | 100                 | 89.06                | 10.94     |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | Jumlah dokumen    | 2       | 545,000,000.00           | 2         | 484,371,250.00           | 100                 | 88.88                | 11.12     |
|     | <b>Total</b>                                                                                                         |                   |         | <b>34,143,723,515.00</b> |           | <b>28,255,800,726.00</b> |                     | 82.76                | 17.24     |
|     | <b>Rata-rata Kinerja Program</b>                                                                                     |                   |         |                          |           |                          | 98.20               | 78.96                | 21.04     |
|     | <b>Rata-rata Kinerja Sub Kegiatan</b>                                                                                |                   |         |                          |           |                          | 96.26               | 81.70                | 18.30     |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian program untuk tahun 2021 adalah 98,20 meningkat 0,8 poin dari capaian di tahun 2020 yaitu sebesar 97,40%, dengan rata-rata capaian Sub kegiatan 96,26 juga meningkat dari tahun 2020 dimana untuk rata-rata capaian kegiatan adalah sebesar 90,61, peningkatan ini, berbanding lurus dengan semakin meningkatnya efisiensi dalam hal penyerapan anggaran dengan realisasi keuangan sebesar 82,76 lebih efisien dari tahun 2020 yaitu 84,89% dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 17,24%, mengalami peningkatan efisiensi dari tahun 2020 yaitu 15,11 %. Kondisi ini semakin menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terus mengalami peningkatan, begitu pula manajemen kinerja yang berbasis hasil terus di internalisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 13. Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2020 & 2021



Analisis capaian kinerja Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung urusan perencanaan dalam kurun waktu tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **1. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

---

Program ini di tahun 2021 secara target tercapai dengan optimal dengan realisasi sebesar 100 persen namun disatu sisi pada Tahun 2021 merupakan tahun transisi dan terdapat banyak perubahan yang substansial dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dimana di tahun 2021 terdapat pelaksanaan atas perubahan peraturan nomenklatur program dan kegiatan atas terbitnya Permendagri nomor 050 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta amanat pemanfaatan Sistem informasi perencanaan dari Sistem Informasi Elektronik Daerah (SIED/SIMRAL) ke Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) sehingga pada proses penyusunan dokumen perencanaan pemetaan atas perubahan program,kegiatan dan sub kegiatan, sampai pada indikator dan target dan penginputan ulang dilakukan lagi. Secara Konsistensi antara program di RPJMD,RKPD selaras begitu pun pada kegiatan dan sub kegiatan di RKPD dan APBD juga selaras. Namun secara indikator dan target masih banyak yang tidak konsisten. Hal ini terjadi karena dalam proses ini, terdapat kekeliruan dan kesalahan yang mengakibatkan, tidak konsistennya perangkat daerah dan Bappeda dalam mengawal konsistensi yang dimaksud. Disisi lain pelaksanaan program ini dengan capaian tersebut diatas didukung oleh semakin meningkatnya pelaksanaan asistensi serta koordinasi dari Bappeda keseluruhan perangkat daerah di masing-masing koordinasi bidang perencanaan, selain itu peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi dan pelaksanaan inovasi mulai dari pemanfaatan web Aplikasi E-Pantau, BECIK, serta Geoportal mendukung capaian Program ini.

## **2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

---

Sama seperti program sebelumnya diurai diatas, Program ini belum tercapai secara optimal karena capaian dari program ini adalah mengukur rata-rata capaian indikator program dari seluruh perangkat daerah dibawah koordinasi bidang perencanan

yaitu Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan serta Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah. Dari ke-3 bidang perencanaan hanya bidang perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah yang pencapaiannya sesuai target, sedangkan untuk 2 bidang lainnya belum tercapai secara optimal. Adapun penyebab belum tercapainya target dikarenakan faktor eksternal yang memang tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara karena terkait dengan Pandemi Covid-19 yang masih juga merebak di tahun 2021 sehingga mempunyai implikasi yang signifikan ke berbagai sektor mulai sektor kesehatan, ekonomi sampai pemerintahan. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerugian yang luar biasa. Tidak hanya di bidang Kesehatan, sosial dan budaya, namun juga di bidang ekonomi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya maupun daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya. Dalam upaya memutus rantai penyebaran wabah covid-19 Pemerintah baik pusat maupun daerah terus menerapkan berbagai upaya, salah satunya physical distancing dengan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada setiap institusi kementerian/lembaga maupun perangkat daerah. Hal ini tentu saja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyerapan anggaran yang kurang maksimal. Banyak program dan kegiatan yang sebenarnya telah terjadwal dengan baik tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya dengan pertimbangan keamanan dan Kesehatan sehingga berakibat pada banyaknya target yang tidak tercapai. Adapun secara umum pendukung pencapaian dalam pelaksanaan program ini adalah terus meningkatnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh bidang perencanaan dan Bidang P3D di Bappeda Kabupaten kepada seluruh perangkat daerah dan peningkatan kompetensi dari para perencana di Bappeda. Selain itu sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antara prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah terus dilakukan sehingga capaian-capaian yang menjadi target dapat dilaksanakan dengan baik.

### **3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**

---

Secara umum Program ini tercapai, hanya pada indikator Cakupan layanan administrasi perkantoran yang tidak tercapai secara optimal dikarenakan ada kegiatan yang sub kegiatannya tidak dapat dilaksanakan, yaitu seperti kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dimana dari target 40 orang ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi hanya terealisasi sebanyak 32 orang dikarenakan, kondisi pandemi sehingga tidak dapat mengirimkan ASN untuk mengikuti Bimbingan Teknis. Kegiatan lainnya yang tidak dapat dilaksanakan adalah sub kegiatan penyediaan bahan/material pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dimana sub kegiatan ini adalah kegiatan untuk fasilitasi pelaksanaan pameran di peringatan Merah Putih di Kecamatan Sanga-Sanga tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sama seperti sebelumnya yaitu Pandemi Covid-19 Sehingga kegiatan Tahunan Peringatan Merah Putih Sanga-sanga tidak dilaksanakan.

Selain 2 (dua) sub kegiatan diatas, sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak dapat terlaksana dikarenakan kegiatan pengadaan/pembangunan jalan/tangga untuk penyandang difabel tidak dapat dilaksanakan karena pada tahun 2021, juga dilaksanakan rehabilitasi pada Gedung Bappeda yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Secara umum pendukung capaian program ini, adalah meningkatnya kualitas koordinasi internal yang dilakukan oleh seluruh ASN di lingkup Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terutama di Bagian Sekretariat (Penyusunan Program dan Keuangan, Umum dan Tatalaksana, serta Kepegawaian) dan dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga sebagai program penunjang dan pendukung capaian sasaran strategis secara umum, program ini dapat terlaksana dengan baik.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan dan kinerja sasaran, dimana juga disajikan analisis atas kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran dan analisa atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2021 dari 3 (tiga) IKU yang telah diperjanjikan berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021, 2 (dua) IKU telah berhasil dengan realisasi capaian melampaui target, hanya pada IKU Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah belum tercapai dengan optimal.

Rata-rata Capaian program tercapai 98,20 % dan rata-rata capaian Sub kegiatan 96,26 keberhasilan pencapaian target ini menggambarkan bahwa Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya meningkatkan kualitas capaian kinerja dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, kedepan peningkatan kinerja akan terus dilakukan dan menjadi kewajiban seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertahankannya dalam rangka menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terwujud.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2021 ini dibuat dan disajikan. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kutai kartanegara sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Daerah.

Tenggarong, 22 Februari 2022  
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara  
Plt. Kepala



**Sy. Vanesa Vilna SIS.SE.,MM**  
NIP. 19740217 199703 2 004